



Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang

2012

Kerjasama
Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana dengan
Badan Pusat Statistik
Kota Tanjungpinang



Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012



KERJASAMA
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
dan
Badan Pusat Statistik
Kota Tanjungpinang



<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

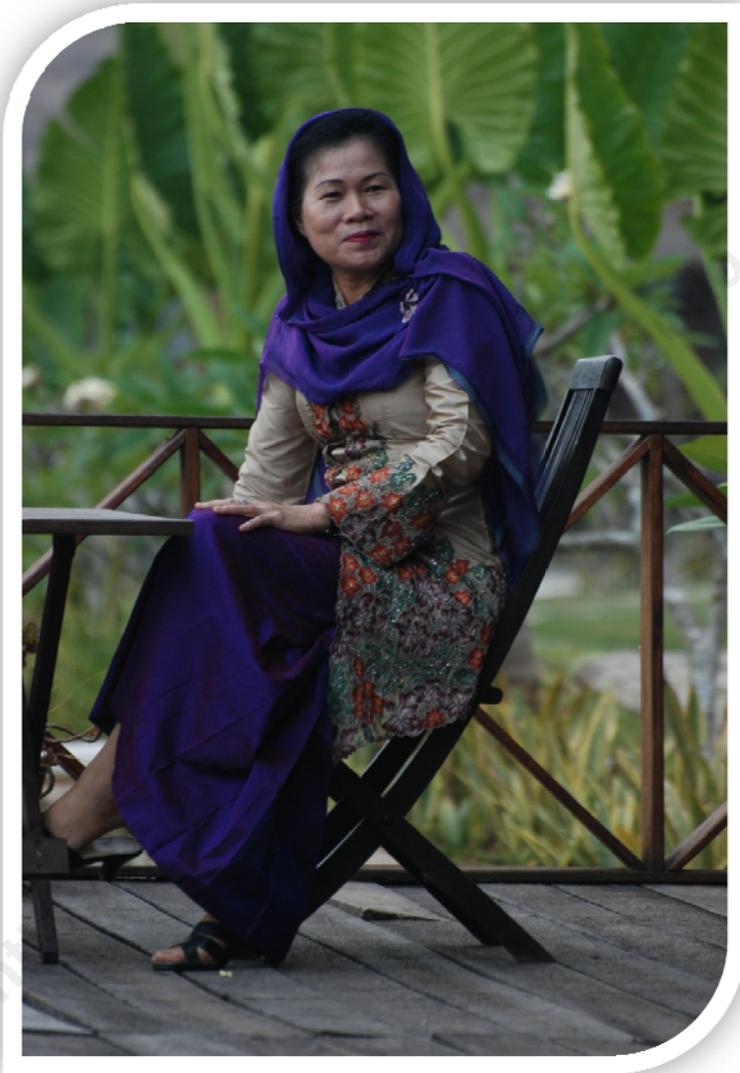
Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012

Katalog BPS :
ISSN : -
No. Publikasi :
Ukuran Buku : 16,5 cm x 22 cm
Jumlah Halaman : xii + 108 Halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Diterbitkan oleh :
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Tanjungpinang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



Hj.SURYATATI A.MANAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KATA SAMBUTAN

Penyusunan publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ini, merupakan hal penting yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan perencana dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan, serta evaluasi gender dan pemberdayaan perempuan.

Adanya informasi yang menggambarkan peran perempuan dan laki-laki dapat menunjukkan warna dan permasalahan lokal dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dalam mencapai terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini merupakan keanekaragaman isu gender yang dapat diamati, dipelajari dan dianalisa untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas program pemberdayaan perempuan di tingkat daerah dan nasional.

Mengingat pentingnya penyusunan informasi statistik tersebut, maka diharapkan kepada seluruh instansi, lembaga, serta pemangku kepentingan (*Stake Holder*) agar lebih memberikan perhatian dan prioritas dalam ketersediaan data.

Sewajarnya kita sambut gembira penerbitan publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012 ini sebagai hasil kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang. Diharapkan kerjasama ini dapat dikembangkan di waktu mendatang dengan melakukan lebih banyak lagi kajian dan analisis.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Tanjungpinang, Oktober 2012
WALIKOTA TANJUNGPINANG

Hj. SURYATATI A. MANAN



BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG

KATA SAMBUTAN

Ketersediaan data dan statistik yang dirinci menurut jenis kelamin merupakan hal yang vital bagi badan pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan statistik dan analisis gender, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat tepat sasaran dan dapat menggambarkan arah perkembangan program di masa mendatang.

Penyusunan publikasi ini mencakup aspek-aspek strategis seperti Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, yang dipilih berdasarkan perspektif gender dan partisipasi perempuan di Sektor Publik, serta Kesehatan Lingkungan dan Perumahan dan beberapa Indikator Komposit.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, Penyusunan Publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012 ini telah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan penyusunan publikasi ini merupakan perwujudan komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dalam memenuhi amanat tentang Penyelenggaraan Data Gender di Kota Tanjungpinang.

Penghargaan disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang atas kerjasama yang telah diberikan bagi terwujudnya publikasi ini.

Tanjungpinang, Oktober 2012
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG

Drs. H. GATOT WINOTO, MT
NIP. 19601002 199103 1 005



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012” ini merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Berbagai informasi statistik tentang seberapa besar peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan baik yang bersumber dari data sekunder maupun hasil survei dan sensus yang dilaksanakan BPS, dimuat dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel sederhana, dengan harapan para pengguna data dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumen akan data yang tepat waktu, BPS dengan misi “Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data yang berkualitas untuk semua”, terus berusaha meningkatkan kecepatan waktu penerbitan dan mutu data yang tersedia. Dengan pengertian dan kerjasama yang baik dari dinas/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat mudah-mudahan harapan di atas segera dapat diwujudkan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih banyak mengandung kelemahan, karena itu saran dan kritik bagi perbaikan penerbitan berikutnya sangat kami harapkan.

Dengan terbitnya “Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang 2012” ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan dari seluruh dinas/instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

Tanjungpinang, Oktober 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG

H. AHMADINI, SE
NIP. 19610311 198301 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Sambutan Walikota Tanjungpinang	<i>v</i>
Kata Sambutan Kepala BPPKB Kota Tanjungpinang	<i>vi</i>
Kata Pengantar Kepala BPS Kota Tanjungpinang	<i>vii</i>
Daftar Isi	<i>viii</i>
Daftar Tabel	<i>x</i>
Daftar Gambar	<i>xii</i>
Bab I. Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sumber Data dan Landasan Hukum	6
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Wilayah	9
2.1 Geografi	9
2.2 Sejarah	11
2.3 Sosial budaya	14
Bab III. Kependudukan	19
3.1 Jumlah Penduduk dan Pertambahan Penduduk	20
3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	22
3.3 Komposisi Umur	24
3.4 Rasio Ketergantungan	28
3.5 Rasio Jenis Kelamin	30
Bab IV. Pendidikan	35
4.1 Angka Melek Huruf	37
4.2 Angka Partisipasi Sekolah	39
4.3 Angka Partisipasi Kasar	42
4.4 Angka Partisipasi Murni	43
4.5 Pendidikan yang Ditamatkan	45
4.6 Rata-rata Lama Sekolah	47
4.7 Angka Putus Sekolah	48
4.8 Tenaga Pendidik	48

Bab V. Kesehatan	53
5.1 Derajat Kesehatan Penduduk	54
5.2 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil	58
5.3 Saranan dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	61
Bab VI. Ketenagakerjaan	65
6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67
6.2 Tingkat Pengangguran.....	70
6.3 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan.....	72
6.4 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	75
6.5 Penduduk Bekerja menurut Jenis pekerjaan Utama	76
Bab VII. Sektor Publik	81
7.1 Politik dan Legislatif	82
7.2 Yudikatif.....	84
7.3 Eksekutif	85
Bab VIII. Kesehatan Lingkungan dan Perumahan	91
8.1 Rumahtangga berdasarkan jenis atap	92
8.2 Rumahtangga berdasarkan jenis dinding	93
8.3 Rumahtangga berdasarkan jenis lantai	94
8.4 Rumahtangga berdasarkan sumber listrik.....	95
8.5 Rumahtangga berdasarkan sumber air minum	96
8.6 Rumahtangga berdasarkan sanitasi	97
8.7 Rumahtangga berdasarkan kepemilikan.....	99
Bab IX. Indikator Komposit	103
9.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	103
9.2 Indeks Pembangunan Gender	105
9.3 Rumahtangga berdasarkan jenis lantai	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinag Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011	21
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Kecamatan Tahun 2011	23
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	26
Tabel 3.4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011	29
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Sex Ratio Kota Tanjungpinang Tahun 2011	31
Tabel 4.1. AMH Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin 2010-2011	38
Tabel 4.2. Standar Kelompok Umur Setiap Jenjang Pendidikan	40
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	40
Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	42
Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	44
Tabel 4.6. Persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	46
Tabel 4.7. Rata-rata Lama Sekolah Kota Tanjungpinang 2009-2011	47
Tabel 4.8. Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tanjungpinang 2011	48
Tabel 4.9. Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011	49
Tabel 5.1. Jumlah Bayi Lahir Hidup, Bayi Lahir Mati, Bayi Mati Setelah Lahir, Balita Mati dan Kematian Ibu di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	55
Tabel 5.2. Angka Harapan Hidup Kota Tanjungpinang 2009-2011	57
Tabel 5.3. Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Nakes Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011	59
Tabel 5.4. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi TT dan Zat Besi di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011	60
Tabel 5.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Fasilitas Di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011	61

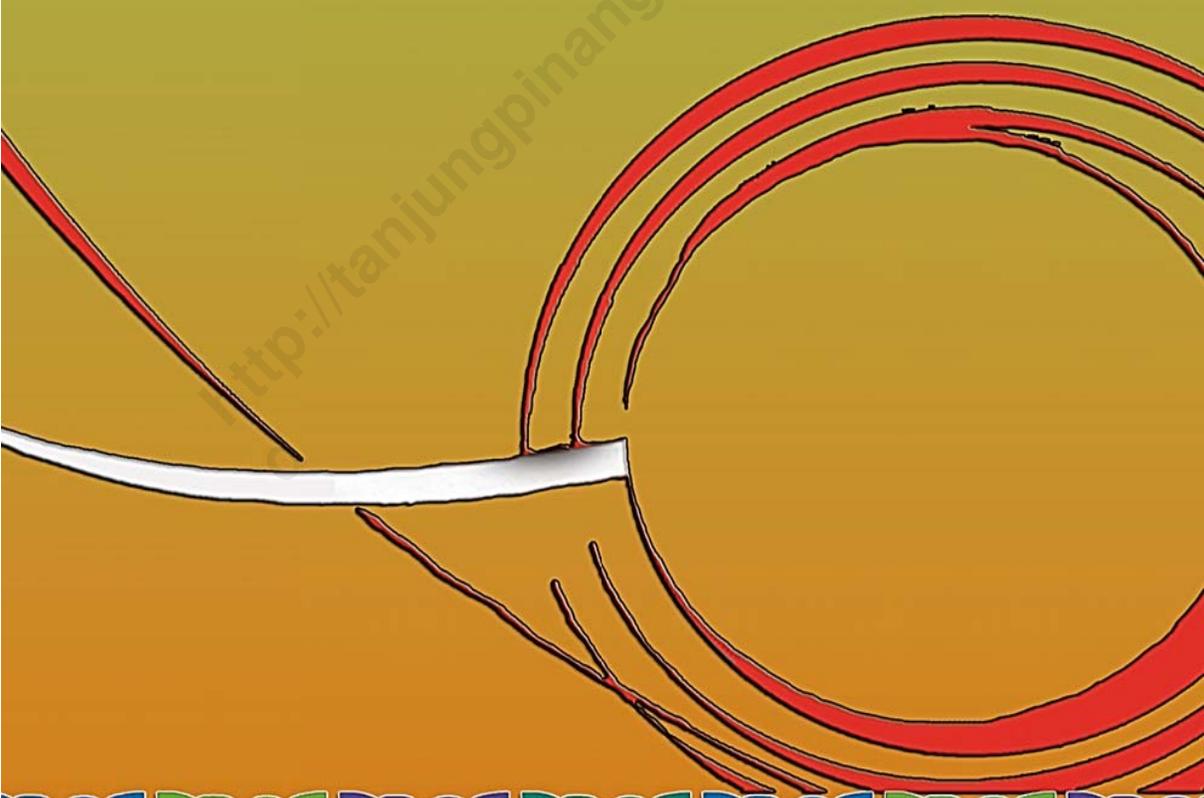
Tabel 5.6.	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk tahun 2010-2011	62
Tabel 6.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	68
Tabel 6.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja menurut jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	71
Tabel 6.3.	Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	73
Tabel 6.4.	Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	76
Tabel 6.5.	Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja jenis pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	77
Tabel 7.1.	Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, Masa Jabatan 2009 - 2014	83
Tabel 7.2.	Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	84
Tabel 7.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	86
Tabel 8.1	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	92
Tabel 8.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	93
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	94
Tabel 8.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Listrik dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	95
Tabel 8.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	96
Tabel 8.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	98
Tabel 8.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011	99
Tabel 9.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011	104
Tabel 9.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011	106
Tabel 9.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kota Tanjungpinang	10
Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011	21
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	24
Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2011	27
Gambar 3.4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang Tahun 2011	30
Gambar 3.5. Sex Ratio dan Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2011	31
Gambar 4.1. AMH Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin, 2010-2011	38
Gambar 4.2. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011	40
Gambar 5.1. Angka Harapan Hidup Kota Tanjungpinang 2009-2011	57
Gambar 5.2. Jumlah Tenaga Kesehatan tahun 2010-2011	62
Gambar 6.1. Diagram Ketenagakerjaan	67
Gambar 6.2. Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Tanjungpinang, 2011	74
Gambar 6.3. Penduduk 15 tahun Ke atas yang Bekerja menurut Jenis pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	78
Gambar 7.1. Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011	85
Gambar 7.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang 2011	87



BAB I
PENDAHULUAN



<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penandatanganan *Millenium Development Goal's (MDG's)*, dengan Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan kesepakatan tersebut, merupakan salah satu momentum untuk lebih melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Tuntutan dari *MDG's* tersebut adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan.

Perempuan dan laki-laki baik sebagai manusia atau sebagai warga negara di dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia tidaklah berbeda. Sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan tidaklah berada di bawah potensi laki-laki. Mereka memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai status dan peranan perempuan dalam masyarakat yang masih bersifat subordinatif, perempuan masih terpinggirkan dan belum dianggap sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Hal itu terlihat dari masih sedikitnya perempuan yang berkesempatan menempati posisi di dalam pemerintahan, dalam badan legislatif, maupun yudikatif, serta di dalam peranannya secara umum di masyarakat.

Selain fenomena di atas, kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari pun masih banyak terlihat. Budaya paternalistik yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga, termasuk dalam memutuskan pelayanan dalam masa kehamilan dan keluarga berencana, telah membuat kaum perempuan semakin termarginalkan. Selain itu, rendahnya akses kaum perempuan ke tempat-tempat pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang diakibatkan

batasan-batasan adat dan kebiasaan lingkungan sekitar serta keluarga, menjadi pemandangan yang banyak dijumpai di daerah-daerah, khususnya daerah yang masih kental dengan nuansa adat dan istiadat. Dalam bidang ketenagakerjaanpun tidak jauh berbeda, pada sektor ini kesenjangan gender terjadi terutama dalam hal pemberian upah/gaji serta adanya diskriminasi kesempatan terhadap perempuan yang sedang hamil.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada ditangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang.

Statistik dan indikator yang dirinci menurut jenis kelamin adalah alat yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan program yang berperspektif gender untuk dapat mencapai hasil pembangunan yang setara dan adil. Dengan menggunakan indikator gender, penyusunan kebijakan dan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih baik serta dapat memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Di samping itu, statistik dan indikator tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender yang selama ini terabaikan.

Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor strategis ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan. Ketersediaan fakta, data, dan informasi kesenjangan gender, berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan.

Penyusunan publikasi Analisis dan Statistik Gender Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ini merupakan salah satu upaya dalam menyediakan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kesetaraan dan keadilan gender di Kota Tanjungpinang. Dalam publikasi ini, disajikan hasil analisis statistik gender di berbagai bidang, antara lain bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Penyusunan publikasi Analisis dan Statistik Gender Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ini dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait, dalam hal ini diprakarsai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang.

1.2. Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ini adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender bagi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah.
2. Meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender.
3. Mensosialisasikan penggunaan data statistik dan indikator gender di kalangan para pembuat kebijakan.
4. Meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistik dan indikator gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di masing-masing daerah.

Adapun tujuan khusus penyusunan publikasi dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ini adalah untuk :

1. Mengetahui kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hukum, dan berbagai bidang lainnya.
2. Memperoleh gambaran tentang karakteristik demografi dan berbagai permasalahan gender yang terjadi di daerah.
3. Menggali informasi mengenai berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan dan kondisi sosial budaya serta isu-isu lokal yang spesifik.

1.3. Sumber Data dan Landasan Hukum

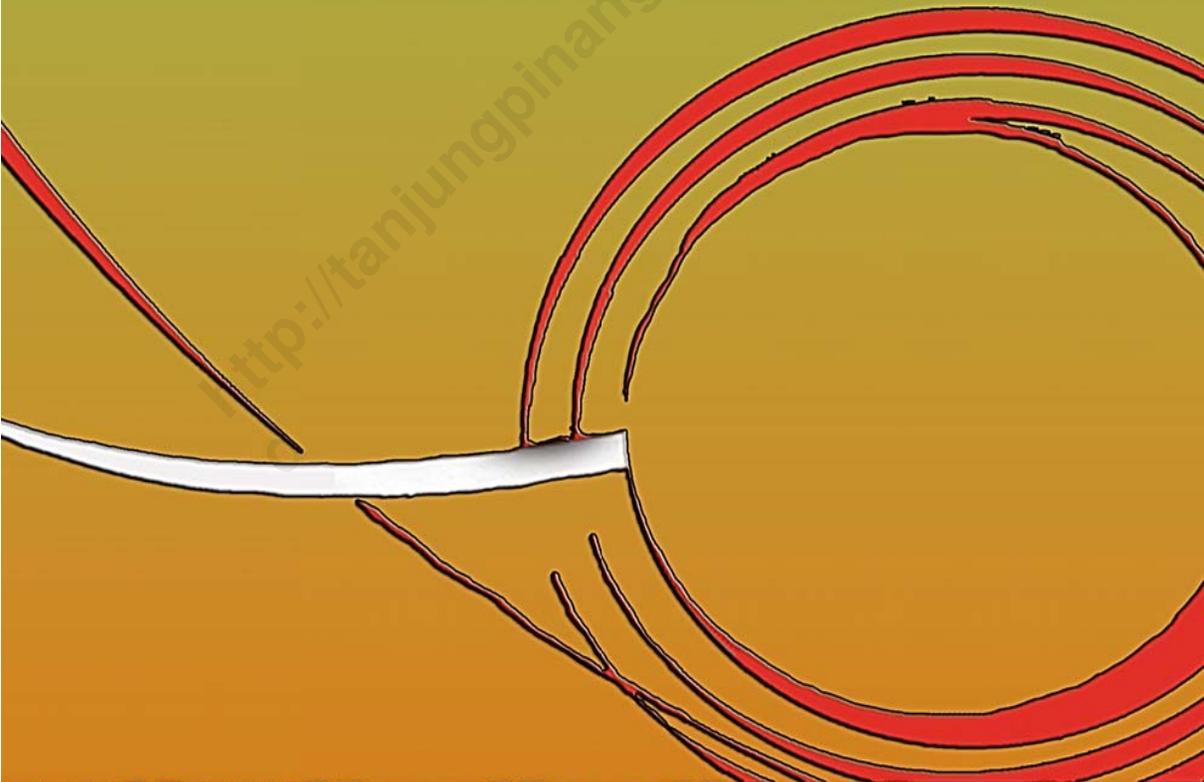
Untuk penyusunan publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang tahun 2012 ini, digunakan data yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari hasil sensus dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011, Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2011, Pendataan Potensi Desa (PoDes) 2011 dan Sensus Penduduk (SP) 2010, serta berbagai data lainnya yang diperoleh dari dinas atau instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepolisian Resort (Polres), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi lainnya.

Sedangkan landasan hukum dalam kegiatan penyusunan publikasi Statistik dan Analisis Gender Kota Tanjungpinang tahun 2012 ini adalah:

1. GBHN Tahun 1999
2. Inpes Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional



BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI WILAYAH



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1. Geografi

Kota Tanjungpinang adalah ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Secara geografis terletak di Pulau Bintan dimana posisinya berada di antara 0° 51' Lintang Utara sampai dengan 0° 59' Lintang Utara dan 104° 23' Bujur Timur sampai dengan 104° 34' Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 239,5 km² yang terdiri dari luas daratan 131,54 km² dan luas perairan sebesar 107,96 km².

Kota Tanjungpinang secara topografis terletak diketinggian 0-70 m diatas permukaan laut, memiliki karakteristik perbukitan dengan kemiringan 0-40%, dataran rendah, kawasan rawa dan hutan bakau. Jenis tanah tergolong kurang baik untuk pertanian dan perkebunan karena merupakan tanah psedolik kuningmerah dan struktur tanahnya mengandung bauksit yang memiliki sifat keasaman yang tinggi. Serta terdiri atas granit dan diorit yang membentuk daerah perbukitan dengan formasi batuan tersebar cukup luas berupa batu pasir.

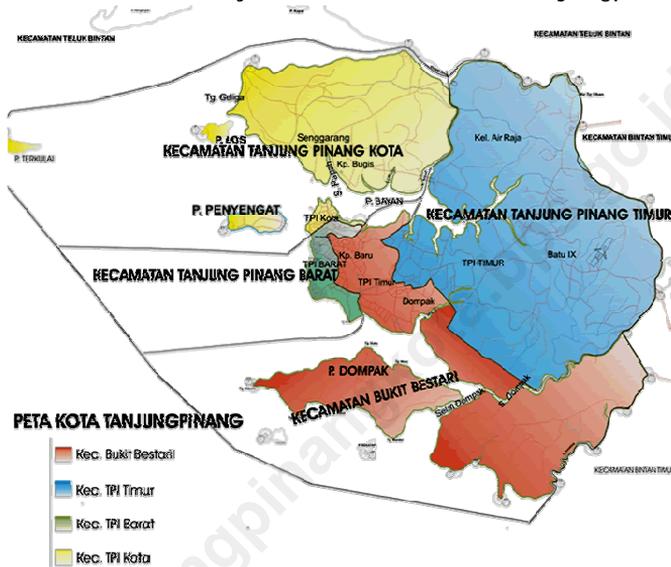
Wilayah Kota Tanjungpinang berada di antara Kota Batam, Kabupaten Bintan, Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Provinsi Riau atau yang sering dikenal dengan sebutan segitiga SIJORI (Singapura, Johor, Riau). Hal ini menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian.

Batas-batas Wilayah Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Utara : Wilayah Kabupaten Bintan (Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Bintan) dan Wilayah Kota Batam.
2. Selatan : Wilayah Kabupaten Bintan (Selat Karas, Desa Mantang Baru, kecamatan Bintan timur).

3. Barat : Wilayah Kota Batam (Selat Karas, Desa Pangkil, Kecamatan Galang).
4. Timur : Wilayah Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Timur).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kota Tanjungpinang



Pada umumnya daerah kota Tanjungpinang beriklim tropis basah yang berubah setiap setengah tahun dengan Suhu berkisar antara rata-rata 21-30 derajat cecius dengan kelembapan rata-rata 61 persen sampai 91 persen, tekanan udara minimal 1000,5 MBS dan maksimal 1014,7 MBS. Secara resmi Kota Tanjungpinang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan Musim kemarau dantidak ada perbedaan musim yang mencolok diantara kedua musim tersebut,dimana hujan dapat turun sepanjang tahun. Namun setiap akhir sampai dengan awal tahun terjadi "Angin Utara" yang sangat berbahaya dengan gelombang yang sangat kuat.Curah hujan rata-rata 636-3050 mm per tahun.

2.2. Sejarah

Nama Tanjungpinang, diambil dari posisinya yang menjorok ke laut yang banyak ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon yang berada di Tanjung tersebut yang merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Tanjungpinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan, dimana terdapat kerajaan Bintan yang berpusat di Bukit Batu. Dengan posisi yang strategis di Pulau Bintan dan pusat kebudayaan Melayu serta lalu lintas perdagangan sehingga Tanjungpinang menjadi sangat terkenal.

Sejarah Tanjungpinang juga tidak terlepas dari Kerajaan Melayu Johor-Riau. Berdasarkan Sulalatus Salatin kawasan kota ini merupakan bagian dari Kerajaan Melayu, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor.

Pada masa Kerajaan Johor, Sultan Abdul Jalil Syah yang memerintahkan Laksamana Tun Abdul Jamil membuka sebuah Bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di Sungai Carang, Hulu Sungai Riau. Bandar yang baru tersebut menjadi Bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau. Peranan Tanjungpinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk Bandar Riau.

Pada masa Perang Riau pada tahun 1782-1784 antara Kerajaan Riau dengan Belanda, keberadaan Tanjungpinang semakin diperhitungkan yaitu pada masa Pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Haji Fisabilillah. Peperangan selama 2 tahun ini mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 1784 dengan kemenangan pada pihak kerajaan Melayu Riau yang ditandai dengan hancurnya kapal komando Belanda "Malaka's Wal Faren", dan mendesak Belanda untuk mundur dari perairan Riau. Kemudian peristiwa tersebut diabadikan sebagai hari jadi Tanjungpinang.

Sejak Belanda menguasai wilayah Kerajaan Riau dan campur tangannya dalam Kerajaan, membuat kerajaan Riau mengalami kemunduran, hingga puncaknya terjadi pada saat pemecatan Sultan Riau oleh Belanda pada tahun 1912. Sultan kala itu tidak mau menandatangani Surat pemberhentian tersebut dan lebih memilih untuk pindah ke Singapura. Dan sejak saat itu berakhirlah Kesultanan Riau-Lingga dengan dihapuskannya wilayah Riau-Lingga dari peta Keresidenan Belanda. Dan Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi daerah pusat keresidenan Belanda. Keberadaan Belanda sempat digantikan Jepang dan Tanjungpinang pada waktu itu dijadikan Pusat Pemerintahan Jepang di wilayah Kepulauan Riau. Dan kemudian kembali lagi dipegang Oleh Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan dari *Residentie Riouw* pemerintah Hindia-Belanda.

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan belanda atas wilayah Kepulauan Riau. Tahun 1950, Belanda menyerahkan wilayah Kepulauan Riau Kepada pemerintah Indonesia. Tanjungpinang juga menjadi ibu kota Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 1948. Tahun 1957 berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1957 dibentuklah Propinsi Riau dengan ibukotanya Tanjungpinang, namun tahun 1960 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru.

Setelah lama menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif. Selanjutnya pada tahun 2001 sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang.

Pusat pemerintahan yang semula berada di pusat Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk kemudian dipindahkan ke

Senggarang (bagian utara kota) sebagai pusat pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian barat kota).

Saat ini Tanjungpinang membawahi 4 kecamatan. Keempat kecamatan beserta kelurahan yang berada dibawahnya tersebut antara lain;

1. Kecamatan Bukit Bestari;
 - Kelurahan Dompok
 - Kelurahan Tanjungpinang Timur
 - Kelurahan Tanjung Ayun Sakti
 - Kelurahan Sei Jang
 - Kelurahan Tanjung Ungat
2. Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - Kelurahan Batu Sembilan
 - Kelurahan Melayu Kota Piring
 - Kelurahan Air Raja
 - Kelurahan Pinang Kencana
 - Kelurahan Kampung Bulang
3. Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - Kelurahan Tanjungpinang Kota
 - Kelurahan Penyegat
 - Kelurahan Kampung Bugis
 - Kelurahan Senggarang
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - Kelurahan Tanjungpinang Barat
 - Kelurahan Kemboja
 - Kelurahan Kampung Baru
 - Kelurahan Bukit Cermin

2.3. Sosial Budaya

Penduduk Tanjungpinang pada abad XVIII, semakin bertambah ramai terutama etnis Cina dan India. Disebabkan adanya perjanjian antar Sultan Riau dan Belanda melalui kontrak politik tahun 1857 yang menyatakan bahwa golongan etnis Cina dan India disamakan dengan golongan Eropa. Etnis Cina kebanyakan menjadi pedagang, sedangkan etnis India selain pedagang juga merupakan kelompok yang mengembangkan agama Islam. Akulturasi yang terjadi dengan masuknya agama Budha, Hindu dan Islam telah memberi corak dan warna tersendiri pada budaya melayu serta memperkaya adat istiadat dan budaya penduduk. Pengaruh Islam sangat terasa kental pada adat istiadat penduduk.

Suku Melayu merupakan kelompok etnik yang dominan di kota ini, selain itu terdapat juga etnik Tionghoa, Jawa, Minang, Bugis dan Batak. Sementara bahasa yang digunakan umumnya Bahasa Melayu selain dari pada Bahasa Indonesia. Selain itu Bahasa Tiochiu juga masih digunakan oleh komunitas masyarakat tertentu di Kota Tanjungpinang. Masyarakat majemuk dari berbagai suku bangsa ini dalam kehidupan sosial budaya bertingkah laku sesuai dengan tradisi dan adat sukunya masing-masing. Dalam berinteraksi dengan penduduk suku bangsa lain, mereka mengacu pada kehidupan nasional dan budaya umum lokal yang berlaku. Pada acara-acara tertentu misalnya perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, mereka berpartisipasi dengan menampilkan kesenian tradisionalnya untuk dinikmati oleh anggota masyarakat suku bangsa lainnya.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Tanjungpinang yang terdiri dari berbagai suku bangsa pada saat ini diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan pranata-pranata sosial lainnya yang menuju ke arah pembauran masyarakat modern. Pranata sosial itu berupa kelompok sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sistem pelapisan sosial.

Lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial ini mempersatukan semua anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa untuk hidup dalam suatu keteraturan dan kebersamaan.

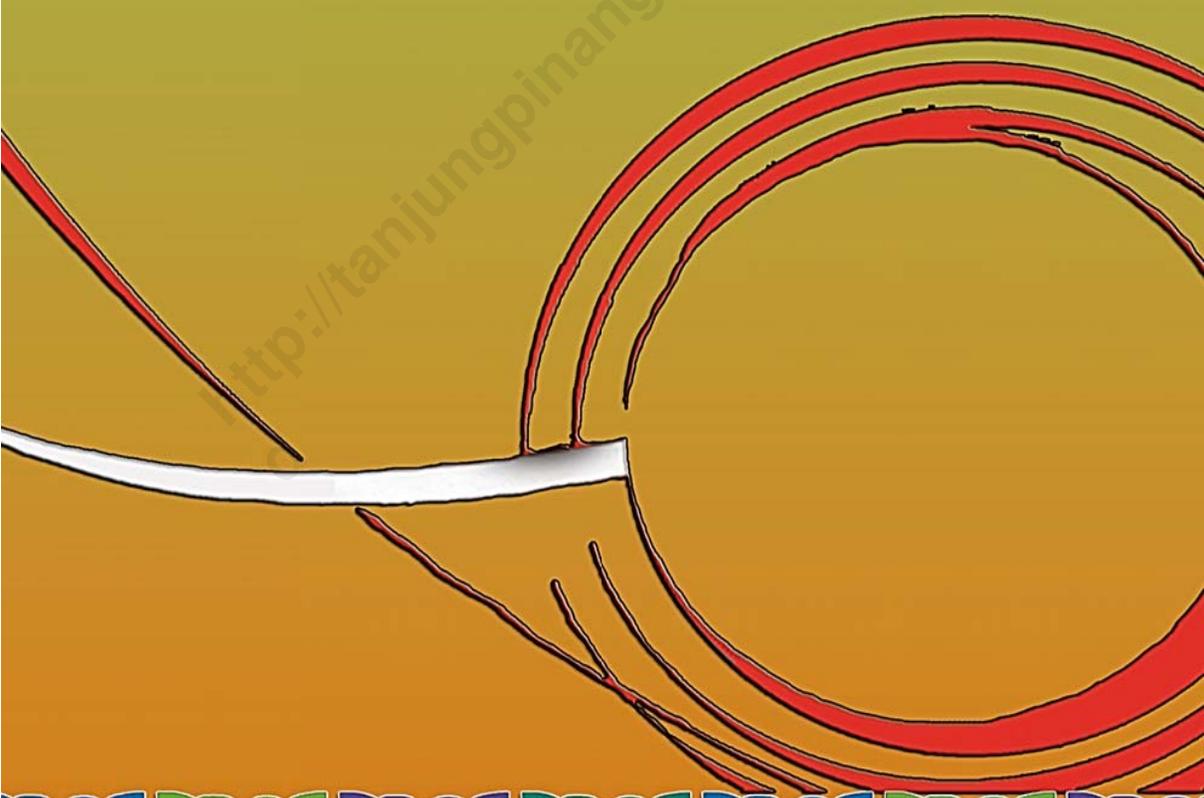
Pada umumnya anggota masyarakat Kota Tanjungpinang beragama Islam. Ajaran agama telah menjadikan mereka akrab satu sama lain karena ajaran agama ini mengajarkan manusia hidup bersaudara. Dalam melaksanakan ibadah agama, mereka menjalankan secara bersama-sama tanpa memandang asal-usul dan status sosial. Di samping agama Islam, terdapat juga agama lain seperti Hindu, Budha dan Kristen. Pada dasarnya kerukunan antar umat beragama di antara anggota masyarakat berbagai suku bangsa dan agama ini terjalin dengan baik dan saling pengertian.

Kegiatan kemasyarakatan sehubungan dengan masalah sosial budaya dilakukan oleh anggota masyarakat kota ini dengan cara bergotong-royong bersama. Sistem gotong-royong sebagai salah satu tradisi budaya masih dipertahankan dan tetap terjaga dengan baik. Musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama juga terlihat pada saat diadakan pertemuan antar warga di RT, RW, dan lingkungan tempat tinggal lainnya. Kegiatan organisasi sosial juga berjalan dengan baik dan dinamis karena menerapkan asas kepentingan bersama.

<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



BAB III
KEPENDUDUKAN



<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



BAB III KEPENDUDUKAN

Penduduk pada dasarnya adalah modal dasar pembangunan yang paling penting dan secara tegas digariskan dalam GBHN. Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung percepatan roda pembangunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar mengindikasikan jumlah angkatan kerja yang besar pula, apalagi jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Akan tetapi, jika sumber daya penduduk tersebut tidak berkualitas maka penduduk tersebut justru akan menjadi penghambat bagi pembangunan itu sendiri. Mengingat peran dan fungsi tersebut, pembangunan di bidang kependudukan selalu mendapat perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan.

Penduduk merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk bukan saja merupakan pelaksana (subjek) melainkan juga sebagai sasaran akhir (objek) dari proses pembangunan. Maka, penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Karena itu dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, perkembangan bidang kependudukan perlu diarahkan sehingga memiliki karakteristik yang dapat menunjang dan menguntungkan pembangunan.

Peran dan fungsi penduduk sangat strategis dalam dinamika pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan bidang kependudukan selalu mendapat tempat utama pada tiap lini tahapan pembangunan. Selain itu, akhir dari setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan

mutu penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pasal 3 ayat (1) undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk, dengan lingkungan hidup.

Dipandang dari sisi jumlah, penambahan penduduk di suatu wilayah akan membawa dampak yang sangat menguntungkan bagi ketersediaan angkatan kerja. Pada sisi lain, penambahan angkatan kerja menuntut perluasan kesempatan kerja. Jika antara keduanya tidak seimbang maka akan menimbulkan dampak negatif, yaitu lonjakan angka pengangguran (unemployment).

3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang adalah jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Demikian pula di Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk terus bertambah. Berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2007 baru mencapai 174.417 jiwa. Terdiri atas 90.097 laki-laki dan 84.320 perempuan, atau dengan sex ratio sebesar 106,85 persen. Kemudian pada pertengahan tahun 2011, penduduk Kota Tanjungpinang diproyeksikan bertambah menjadi 196.910 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Penambahan absolut jumlah penduduk setiap tahun, secara otomatis juga diiringi dengan selalu

bertambahnya angka laju pertumbuhan penduduk walaupun dengan fluktuasi yang bervariasi.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011

Jenis Kelamin	2007	2008	2009	2010*)	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	90.097	89.105	91.256	95.285	100.310
Perempuan	84.320	89.772	92.056	92.074	96.600
Total	174.417	178.529	183.315	187.359	196.910

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, *)SP 2010, dan Susenas 2007-2011.

Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, *)SP 2010, dan Susenas 2007-2011.

Dengan demikian selama lima tahun sejak tahun 2007 sampai 2011 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang telah bertambah sebanyak 9,48 persen, sedangkan Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,71 persen dibanding tahun 2010.

Perubahan jumlah penduduk selain sebagai konsekuensi logis dari kejadian kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk baik penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang pindah (migrasi keluar). Bagi Kota Tanjungpinang faktor migrasi tampaknya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi dinamika kependudukan di daerah ini. Hal ini adalah konsekuensi dari Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan dan diapit oleh 2 negara tetangga yaitu negara Malaysia dan Singapura dimana banyak penduduk Kota Tanjungpinang yang bermigrasi ke tempat-tempat tersebut maupun sebaliknya.

Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu usaha yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan. Pertumbuhan penduduk yang rendah mungkin oleh sebagian pihak dianggap prestasi karena berhasilnya pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi bumerang bagi daerah karena kekurangan Sumber Daya Manusia akan mendatangkan masalah serius di masa datang.

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pada prinsipnya, penduduk akan tinggal di suatu wilayah yang dapat memberikan suatu kehidupan yang layak termasuk kemudahan mendapatkan sandang dan pangan. Dalam hal ini penduduk cenderung terkonsentrasi pada daerah pusat perekonomian atau yang sudah memiliki sarana serta prasarana yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari komposisi persebaran penduduk Kota Tanjungpinang yang sebagian besar tinggal di

Kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan dan memiliki sarana transportasi yang cukup lengkap.

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kota Tanjungpinang dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah yang cukup signifikan antar kecamatan, terlebih lagi antar desa/kelurahan.

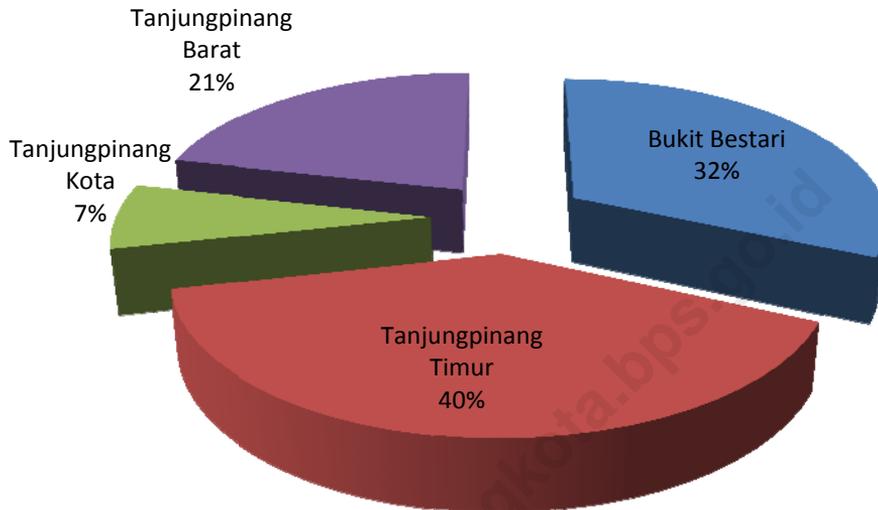
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daratan (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukit Bestari	62.504	69,0	906
Tanjungpinang Timur	78.190	83,5	936
Tanjungpinang Kota	14.049	52,5	267
Tanjungpinang Barat	42.167	34,5	1.222

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan daerah yang paling diminati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dengan jumlah penduduk mencapai 78.190 jiwa atau 40 persen. Disusul oleh Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjungpinang Barat dengan jumlah penduduk mencapai 32 persen dan 21 persen. Sebaliknya, Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan wilayah yang paling sedikit dipilih penduduk sebagai tempat tinggal dengan jumlah penduduk mencapai 14.049 jiwa atau 7 persen dari total penduduk Kota Tanjungpinang. Hal ini tidaklah mengherankan dikarenakan kondisi geografis Kecamatan dan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2011



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, Susenas 2011

Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu wilayah dijadikan dasar oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah. Kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang berada pada kisaran 822 jiwa/km². Ditinjau menurut wilayah kecamatan, Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan daerah yang terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 1.222 jiwa/km², sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota sebesar 267 jiwa/km².

3.3. Komposisi Umur

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai

masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk antar satu daerah dan daerah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan dalam segala bidang maupun dunia bisnis. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. Misalnya, fasilitas pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia sangat berbeda. Fasilitas kesehatan balita cenderung kearah peningkatan gizi dan imunisasi, sedangkan pelayanan kesehatan lansia seharusnya lebih cenderung kearah perawatan penyakit kronis. Untuk bisnis, segmen pasar bagi produk tertentu juga berbeda menurut umur.

Struktur umur dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk keperluan penyederhanaan analisis, maka struktur umur dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun keatas. Dimana untuk kondisi Kota Tanjungpinang proporsi penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun sebesar 29,13%, pada kelompok umur 15-64 tahun sebesar 67,18%, dan pada kelompok umur 65 tahun keatas sebesar 3,68%.

Suatu wilayah dikatakan memiliki struktur umur muda jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun lebih dari 40 persen, sementara penduduk usia 65 tahun keatas kurang dari atau sama dengan lima persen. Sebaliknya suatu wilayah dikatakan memiliki struktur umur penduduk tua jika proporsi penduduk 0-14 tahun kurang dari atau sama dengan 30 persen, sementara proporsi penduduk kelompok umur 65 tahun keatas lebih dari atau sama dengan lima persen.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011

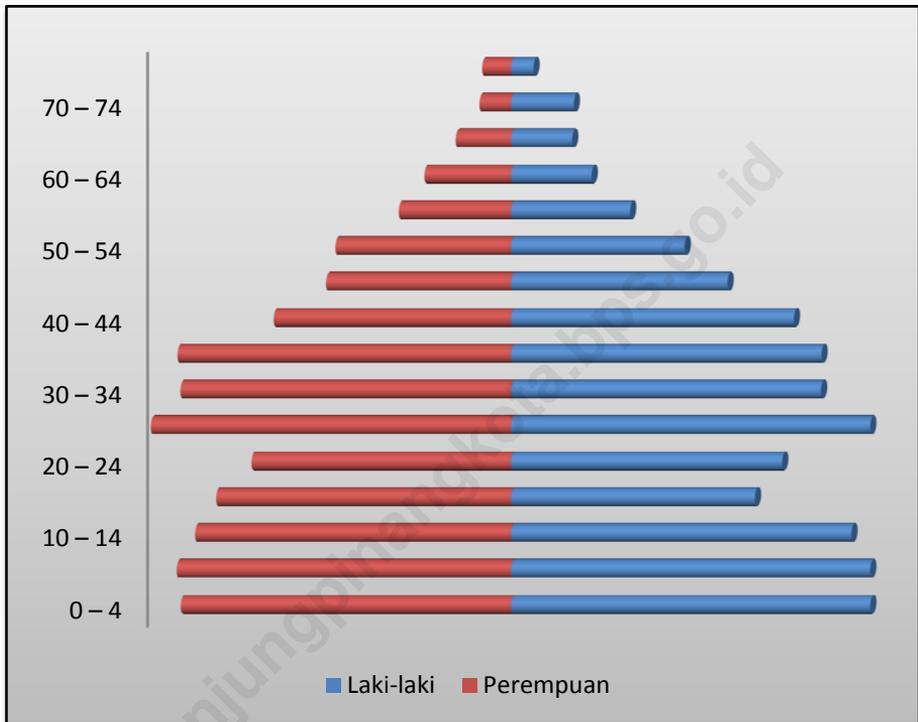
Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
0 - 4	10.368	9.169	19.537
5 - 9	10.329	9.282	19.611
10 - 14	9.479	8.742	18.221
15 - 19	6.764	8.158	14.922
20 - 24	7.558	7.179	14.737
25 - 29	10.216	10.416	20.632
30 - 34	8.635	9.179	17.814
35 - 39	8.648	9.261	17.909
40 - 44	7.882	6.563	14.445
45 - 49	6.005	5.115	11.120
50 - 54	4.815	4.855	9.670
55 - 59	3.305	3.103	6.408
60 - 64	2.240	2.392	4.632
65 - 69	1.697	1.526	3.223
70 - 74	1.743	868	2.611
75 ++	625	793	1.418
Jumlah	100.310	96.600	196.910

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, Susenas 2011

Dilihat dari struktur umur dapat dikatakan bahwa struktur umur penduduk Kota Tanjungpinang masih tergolong muda, dimana persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun mencapai 29,13 persen. Dan persentase penduduk kelompok umur lebih dari 65 tahun keatas kurang dari lima persen yaitu 3.68 persen. Dengan struktur seperti ini, maka di

masa yang akan datang penduduk Kota Tanjungpinang akan didominasi oleh penduduk muda.

Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2011



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Perubahan pada struktur umur penduduk akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, serta proses perpindahan penduduk. Penduduk dengan tingkat kelahiran tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya lebar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Tingkat

kelahiran yang rendah ditandai oleh bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu lebar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya.

Dari gambar piramida penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2011 di atas dapat diketahui bahwa tingkat fertilitas Kota Tanjungpinang tidak terlalu tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh alas piramida yang lebih kecil pada kelompok umur 0-4 tahun, dan membesar pada kelompok umur 25-29 Tahun. Pada Penduduk Laki-laki, jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan pada penduduk perempuan jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok umur 25-29 tahun. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa struktur piramida yang ada masih menunjukkan struktur penduduk muda. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa tingkat pertumbuhan penduduk terutama pada usia produktif cukup tinggi, hal ini merupakan indikasi dari adanya jumlah migrasi masuk yang cukup besar.

3.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak aktif secara ekonomi per 100 penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan

semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif, misalnya untuk memenuhi konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban ketergantungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

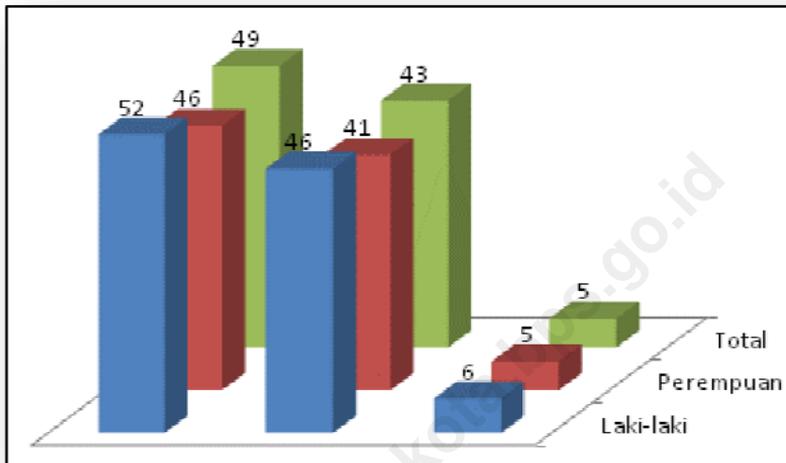
Pada tahun 2011, rasio ketergantungan di Kota Tanjungpinang sebesar 48,85 persen berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 49 orang penduduk usia tidak produktif. Sedangkan rasio ketergantungan untuk anak di Kota Tanjungpinang tahun 2011 adalah sebesar 43,37 persen berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 43 orang penduduk anak-anak. Dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,48 persen berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 5 orang penduduk usia lanjut usia.

Tabel 3.4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Rasio Ketergantungan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
DR	52	46	49
YDR	46	41	43
ODR	6	5	5

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, Susenas 2011.

Gambar 3.4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang Tahun 2011



Apabila dilihat rasio ketergantungan antara penduduk muda dan rasio ketergantungan penduduk tua secara umum dapat dikatakan bahwa yang menjadi beban tanggungan penduduk usia produktif sebagian besar adalah penduduk usia muda (0-14 tahun). Hal ini terlihat dari rasionya yang mencapai 43,37 sedangkan pada penduduk tua, rasionya hanya sebesar 5,48 persen.

3.5. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Secara empiris RJK pada saat lahir umumnya 105, artinya bahwa dari setiap 100 bayi perempuan terdapat sekitar 105 bayi laki-laki. Karena faktor-faktor tertentu (kematian) RJK kemudian perlahan-lahan menurun sehingga umumnya berkisar antara 98

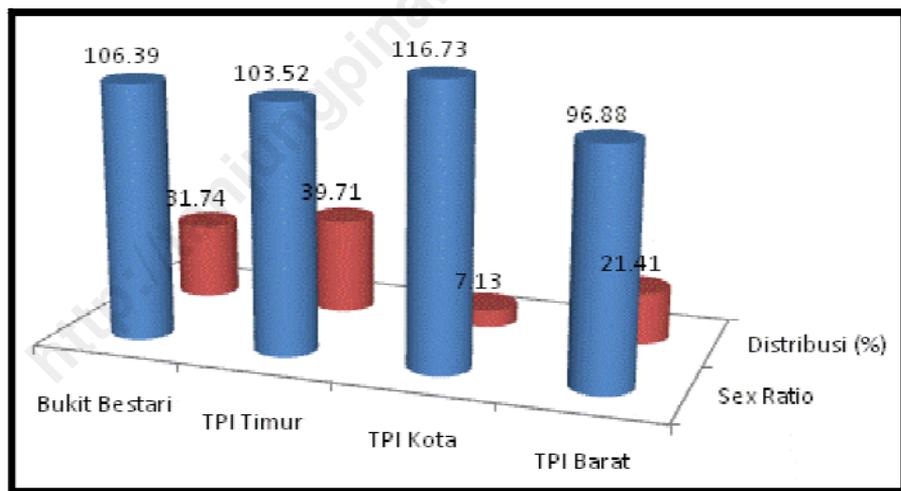
sampai 103. Terjadinya fenomena seperti ini antara lain disebabkan karena usia harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Sex Ratio Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Distribusi (%)
	L	P	L + P		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bukit Bestari	32.221	30.283	62.504	106,39	31,74
Tanjungpinang Timur	39.772	38.417	78.189	103,52	39,71
Tanjungpinang Kota	7.567	6.482	14.049	116,73	7,13
Tanjungpinang Barat	20.750	21.417	42.167	96,88	21,41

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, Susenas 2011.

Gambar 3.5. Sex Ratio dan Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2011

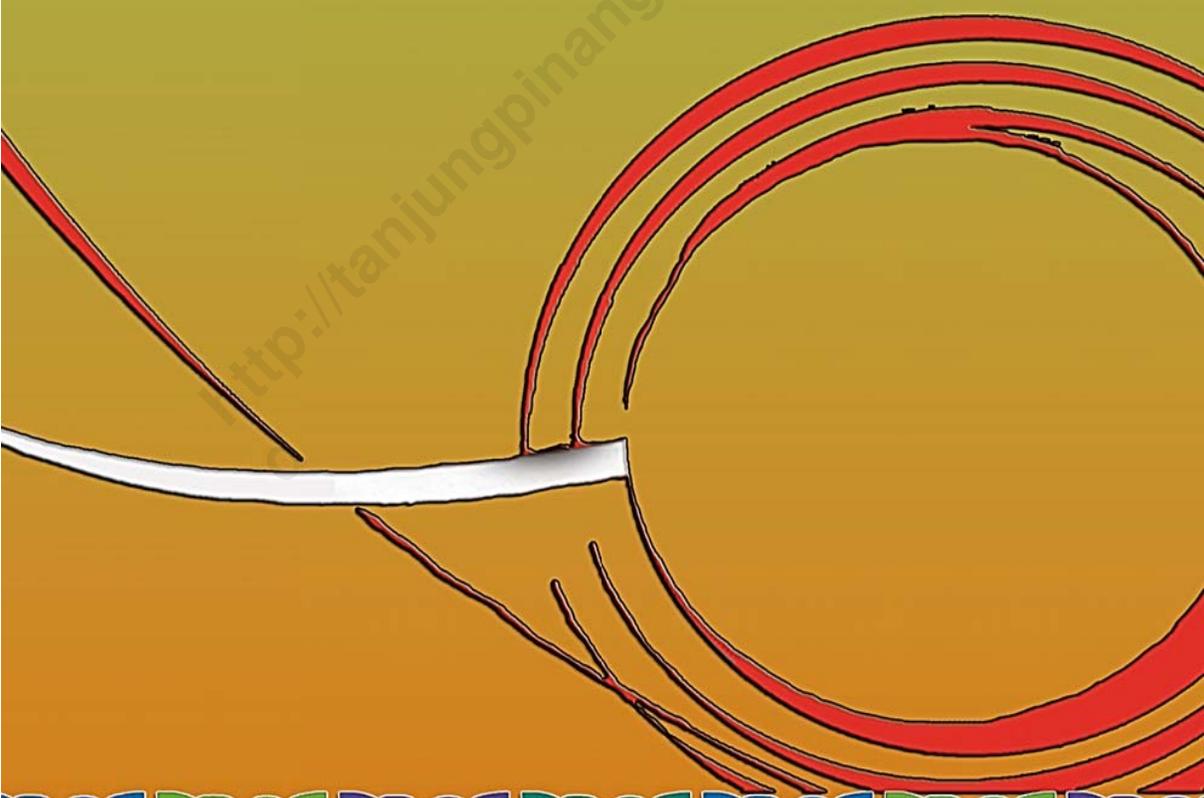


Dari data jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada Tabel 3.5., rasio jenis kelamin penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2011 adalah sebesar 104 artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat

sebanyak 104 orang penduduk laki-laki. Dengan jumlah yang demikian (di atas 100), nilai RJK di Kota Tanjungpinang sedikit berbeda dengan nilai RJK pada umumnya yang rata-rata bernilai di bawah 100. Hal ini menjadi wajar adanya mengingat dari tahun 2007 sampai tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki di Kota Tanjungpinang selalu mendominasi dari pada penduduk perempuan.



BAB IV
PENDIDIKAN



BAB IV PENDIDIKAN

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Semangat UUD ini kemudian dijabarkan lebih konkret dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan sekaligus memberikan tekanan kuat bagi para pengambil kebijakan untuk memberikan prioritas terselenggaranya pendidikan untuk semua warga negara tanpa membedakan dari kelompok mana mereka berasal.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah indikator pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat karena sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber dayanya.

Kebodohan dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan. Pada dasarnya, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan juga merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan yang lebih baik.

Mengingat pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maka pembangunan di bidang pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan tersebut diharapkan merupakan pendidikan yang berkualitas dengan sistem pengelolaan yang efisien untuk menghasilkan manusia terdidik yang

bermutu dan handal sesuai kebutuhan jaman dengan penyelenggaraan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Dimana Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sedangkan Relevansi pendidikan merupakan konsep "Link dan Match", yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Upaya pemenuhan hak setiap insan atas pendidikan di Indonesia merupakan prinsip dasar pembangunan nasional. Sesuai dengan UUD 1945, salah satu amanat yang diemban pemerintah adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejauh mana amanat ini dilaksanakan dapat tercermin antara lain melalui profil pendidikan penduduk. Profil pendidikan penduduk yang akan dibahas secara singkat dalam uraian berikut menyajikan gambaran umum mengenai partisipasi sekolah, fasilitas pendidikan yang tersedia, serta rata-rata tingkat pendidikan (formal) yang dicapai oleh penduduk.

Menilik kepada perkembangan IPM Kota Tanjungpinang selama tahun 2007-2011, kontribusi pencapaian indeks pendidikan mengalami peningkatan secara perlahan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun terjadi perubahan yang terkadang meningkat dan menurun. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pembangunan pendidikan di Kota Tanjungpinang dapat ditinjau melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, serta angka putus sekolah dan rata-rata lama sekolah.

4.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengamati sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun keatas.

AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan. Pada tingkat makro ukuran ini merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar serta lebih mudah menerima pembelajaran/pembaharuan. Dalam bahasa singkatnya, kemampuan baca tulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera.

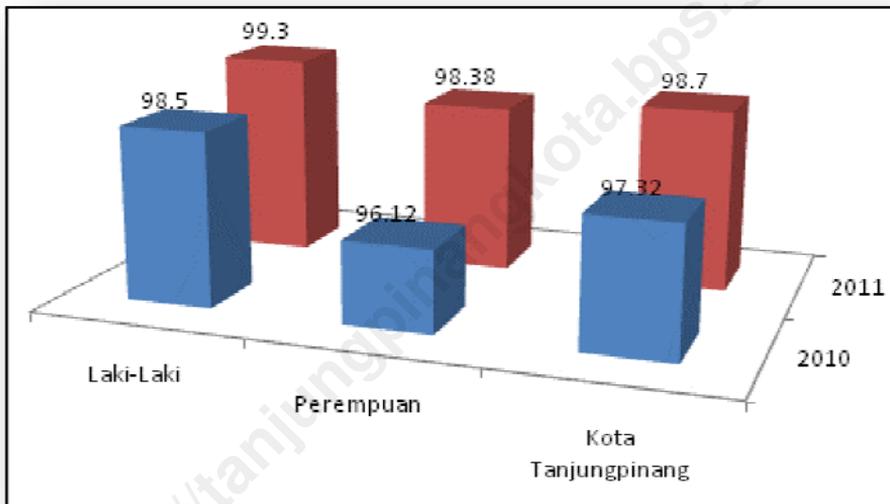
Millenium Development Goal's (MDG's) mencanangkan bahwa kondisi melek huruf menjadi target pembangunan yang harus direalisasikan setidaknya melalui pendidikan dasar dan menengah seiring dengan program kesetaraan gender pada tahun 2015. Secara jelas *MDG's* menegaskan target capaian bidang pendidikan yang antara lain adalah berkurangnya persentase penduduk buta huruf penduduk dewasa (*adult illiteracy rate*) menjadi setengahnya selama periode 1990-2005 (15 tahun) serta meniadakan disparitas gender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk selanjutnya mencapai kesetaraan melalui dunia pendidikan pada sepuluh tahun berikutnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya program Kejar Paket A dan B yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Tabel 4.1 AMH Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin, 2010-2011

Jenis Kelamin	2010	2011
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	98,50	99,30
Perempuan	96,12	98,38
Kota Tanjungpinang	97,32	98,70

Gambar 4.1 AMH Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin, 2010-2011



Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2010-2011.

Menilik kondisi Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 yang lalu, dimana AMH Kota Tanjungpinang berapa pada angka 97,32 persen. Jika kita bandingkan dengan tahun 2011, dimana Kemampuan Baca Tulis Kota tanjungpinang berada pada angka 98,70 persen. Ini berarti pada tahun 2011 hanya sebesar 1,3 persen penduduk Kota Tanjungpinang yang tidak

mampu membaca dan menulis, baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya.

Apabila kita melihat disparitas gender nya, pada tahun 2010 terdapat selisih 2,38 persen antara Kemampuan Baca Tulis Laki-laki dengan Perempuan, sedangkan pada tahun 2011 terdapat selisih hanya 0,92 persen antara Kemampuan Baca Tulis Laki-laki dengan Perempuan. Dengan kata lain kemampuan membaca dan menulis, baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya penduduk Kota Tanjungpinang antara Laki-laki dan Perempuan tidak terlalu berbeda.

Tingginya Kemampuan Baca Tulis di Kota Tanjungpinang perlu diapresiasi, hal ini berarti hampir semua penduduk Kota Tanjungpinang sudah bisa membaca dan menulis, baik dalam bentuk huruf latin, arab maupun lainnya. Masih adanya sebagian kecil penduduk yang buta huruf kemungkinan disebabkan oleh kondisi pendidikan pada masa lalu, dimana waktu itu partisipasi sekolah penduduk masih rendah, akibatnya banyak penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis serta budaya masa lampau yang mendahulukan laki-laki untuk mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan (*patriarkhi*).

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase anak sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Tabel 4.2 Standar Kelompok Umur Setiap Jenjang Pendidikan

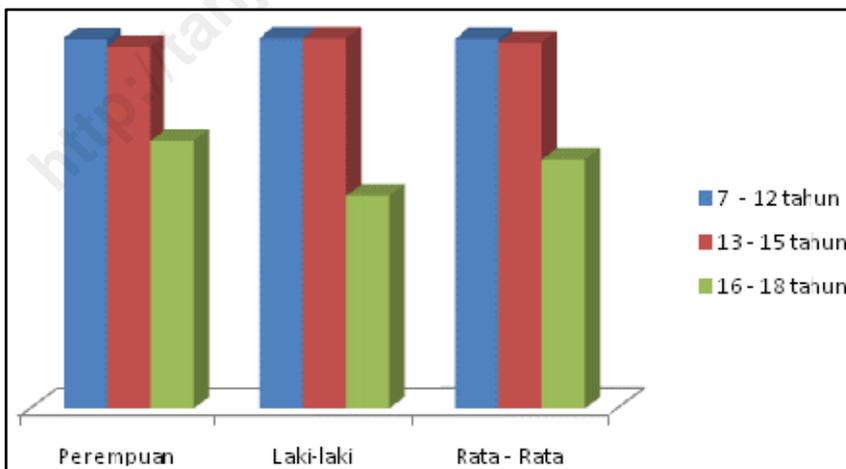
Kelompok Umur	Jenjang Pendidikan
(1)	(2)
7-12 tahun	SD
13-15 tahun	SLTP
16-18 tahun	SLTA

Makin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Rata - Rata
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 tahun	99,70	99,90	99,80
13 - 15 tahun	97,72	99,92	98,82
16 - 18 tahun	72,25	57,41	67,36

Gambar 4.2. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Susenas 2011

Dari tabel 4.3, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sebesar 100 persen. Artinya seluruh penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah baik di tingkat SD maupun SMP. APS penduduk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2011 adalah sebesar 98,82 persen. Apabila kita melihat disparitas gender nya menurut jenis kelamin, APS penduduk laki-laki sebesar 100 persen dan APS penduduk perempuan sebesar 97,72 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi pada kelompok ini hanya sekitar 1,18 persen.

Angka partisipasi sekolah penduduk semakin kecil sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; 1) keikutsertaan anak-anak sekolah yang memasuki usia produktif dalam aktifitas ekonomi (bekerja) dan 2) mahal nya biaya pendidikan (terutama jenjang yang lebih tinggi). Dengan dua alasan tersebut, maka tidak sedikit anak-anak (terutama dari keluarga yang tidak mampu) yang pada akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA ke atas).

APS kelompok usia 16-18 (kelompok usia SLTA) adalah sebesar 67,36 persen. Berbeda dengan APS pada jenjang SD dan SLTP, angka APS pada jenjang ini memang cenderung lebih rendah. Hal ini bisa dimaklumi mengingat tidak semua anak bisa dan mampu untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTA. Akibatnya, persentasenya juga relatif kecil. APS kelompok usia SLTA penduduk laki-laki ternyata lebih rendah dibandingkan dengan APS penduduk perempuan. Pada penduduk perempuan, APS-nya sekitar 72,25 persen, sedangkan APS penduduk laki-laki mencapai 57,41 persen. Hal ini kemungkinan dikibatkan banyak nya anak laki-laki usia 16-18 tahun yang sudah bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga nya.

4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu, berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin		Rata - Rata
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar / MI / Sederajat	103,85	110,68	107,23
SLTP / MTs / Sederajat	88,69	86,30	87,53
SMA / SMK / MA / Sederajat	93,06	102,62	97,29

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Susenas 2011

Secara keseluruhan, APK untuk kategori SD/MI/ sederajat di Kota Tanjungpinang telah mencapai 107,23 persen yang artinya jumlah penduduk yang bersekolah SD/MI/ sederajat sebanyak 107,23 persen dari jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Ini berarti terdapat selisih sebesar 7,23 persen anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun (terlalu cepat masuk sekolah) atau diatas 12 tahun (tinggal kelas) yang masih bersekolah SD/MI/ sederajat. Bila dilihat disparitas gender nya menurut jenis kelamin, APK SD/MI/ Sederajat penduduk laki-laki lebih besar 6,83 persen.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami perubahan, dimana pada tahun 2010 APK tingkat SD/MI/ sederajat mencapai 118,82 persen sehingga pada tahun 2011 APK tingkat SD

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus siswa tertinggal atau masuk terlalu cepat pada jenjang SD sederajat semakin berkurang.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama, angka partisipasi kasar (APK) Kota Tanjungpinang tahun 2011 berada pada angka 87,53 persen. Dengan kata lain masih terdapat 30,62 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum terjangkau oleh wajib belajar sembilan tahun. Bila dilihat disparitas gender nya menurut jenis kelamin, APK SLTP/MTs/Sederajat penduduk perempuan lebih besar 2,39 persen. Sebagaimana halnya dengan jenjang sekolah dasar, APK pada jenjang sekolah menengah pertama ini juga mengalami adanya perubahan, jika dibandingkan pada tahun 2010, APK tingkat SLTP naik sebesar 8,46 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah pada tingkat SLTP.

Pada jenjang sekolah menengah atas, APK juga menunjukkan adanya perubahan, dimana pada tahun 2011 APK Kota Tanjungpinang sebesar 97,29 persen. Dengan demikian APK untuk jenjang ini mengalami penurunan 10,53 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kasus siswa tertinggal atau masuk terlalu cepat pada jenjang SMA sederajat semakin berkurang. Bila dilihat disparitas gender nya menurut jenis kelamin, APK SMA/SMK/MA/Sederajat penduduk laki-laki lebih besar 9,56 persen.

4.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase murid dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di umur yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik,

karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Jenjang Pendidikan (1)	Jenis kelamin		Rata - Rata (4)
	Perempuan (2)	Laki-laki (3)	
Sekolah Dasar / MI / Sederajat	93,59	95,07	94,32
SLTP / MTs / Sederajat	69,38	66,77	71,84
SMA / SMK / MA / Sederajat	63,73	46,89	56,29

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Susenas 2011

Hasil Susenas 2011 menunjukkan bahwa APM untuk jenjang sekolah Dasar sebesar 94,32 persen. Angka ini berarti bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 94 orang sedang bersekolah di SD, sisanya yang 2 orang belum masuk SD atau sudah bersekolah di SLTP. APM untuk jenjang SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 71,84 persen dan 56,29 persen. Relatif rendahnya APM pada jenjang SLTP disebabkan karena banyak anak usia 13-15 tahun yang justru masih bersekolah di jenjang SD, begitupun juga APM jenjang SLTA. Anak-anak pada jenjang umur 16-18 justru masih banyak yang bersekolah di jenjang SLTP. Kemungkinan besar, mereka ini adalah anak-anak yang tidak naik kelas ataupun anak yang dulunya 'terlambat' masuk sekolah.

Bila dilihat disparitas gender nya menurut jenis kelamin, APM SD/MI/Sederajat penduduk laki-laki lebih besar 1,48 persen. Sedangkan untuk APM SLTP / MTs / Sederajat penduduk perempuan lebih besar 2,61 persen dan untuk SMA / SMK / MA / Sederajat juga penduduk perempuan lebih besar 16,84 persen.

Kecenderungan siswa yang tertinggal terutama banyak terjadi pada daerah-daerah pedesaan, sementara kasus siswa yang terlalu cepat masuk sekolah banyak terjadi di daerah perkotaan yang sudah maju. Hal ini juga perlu menjadi perhatian agar jangan sampai terjadi kesenjangan yang berlebihan.

4.5. Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator lain yang juga sangat penting dalam bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kemampuan sumber daya manusia, sampai sejauh mana keberhasilan upaya peningkatan sumber daya manusia dari segi pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas penduduk ditentukan oleh jenjang pendidikan yang ditamatkan, oleh sebab itu secara spesifik kualitas sumber daya manusia berdasarkan preferensi gender ditentukan oleh jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Upaya peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan memiliki akses yang baik pada pendidikan dan sumber informasi lainnya. Dengan pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga ia lebih mampu melihat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan setiap peluang yang ada untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hanya dengan pendidikanlah perempuan Indonesia akan memiliki jalan untuk ikut serta dalam hidup kemasyarakatan, dimana salah satunya adalah berhasil mengembangkan jati diri mereka sehingga mampu menjadi pemimpin dilingkungannya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tanjungpinang. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan Program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 4.6. Persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum tamat SD	17,58%	19,07%	18,32%
SD/MI	19,96%	22,02%	20,98%
SMP/MTs	17,54%	19,77%	18,64%
SMU/MA/SMK	34,96%	29,21%	32,11%
Diploma I/II/III	2,28%	4,40%	3,33%
Diploma IV/S1/S2/S3	7,68%	5,53%	6,62%
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Susenas 2011

Berdasarkan tabel 4.5, bisa dilihat bahwa 62,46 persen penduduk laki-laki dan 58,91 persen penduduk perempuan sudah menamatkan sekolah sampai jenjang SLTP, sisanya 37,54 persen penduduk laki-laki dan 41,09 persen penduduk perempuan belum tamat SLTP, jadi masih cukup banyak penduduk yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya memenuhi program pemerintah wajib belajar 9 tahun.

Dari penduduk yang pernah bersekolah, sekitar 20,98 persen adalah tamatan SD atau pernah sekolah SD namun tidak tamat. Sedangkan penduduk yang tamat SMP dan SMA masing-masing sebesar 18,64 persen dan 32,11 persen. Sementara itu, penduduk Tanjungpinang yang sudah tamat pada jenjang diploma/sarjana hanya sekitar 9,95 persen.

Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk perempuan yang mempunyai ijazah SD/tidak punya ijazah SD dan mempunyai ijazah SMP/MTs/Sederajat ternyata lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara itu, kondisi ini berbalik pada jenjang pendidikan setelah SMP/MTs/Sederajat, dimana persentase penduduk laki-laki yang

mempunyai ijazah SLTA dan Diploma IV/S1/S2/S3 lebih besar dari penduduk perempuan. Penduduk perempuan yang berijazah SD dan SLTP masing-masing sekitar 22,02 persen dan 19,77 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 19,96 persen dan 17,54 persen. Sementara itu penduduk laki-laki yang berijazah SLTA dan Diploma IV/S1/S2/S3 masing-masing sebesar 34,96 persen dan 7,68 persen, lebih besar dari penduduk perempuan yang masing-masing sebesar 29,21 persen dan 5,53 persen.

4.6. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (dalam tahun) yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lamanya sekolah (MYS) merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia yang menggambarkan besarnya daya serap dunia pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, khususnya terhadap pendidikan dasar dan menengah. Karena merupakan suatu proses yang merefleksikan output kondisi sosial ekonomi masyarakat, besaran rata-rata lamanya sekolah akan sangat sulit untuk berubah dalam waktu yang relatif singkat. Semakin tinggi MYS secara umum akan semakin baik kualitas SDM yang ada.

Tabel 4.7 Rata-rata Lama Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,24	9,42	9,68

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Susenas 2009-2011

Dari tabel 4.6, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tanjungpinang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 9,68 tahun.

Ini berarti rata-rata pendidikan penduduk kota Tanjungpinang sudah sampai taraf kelas 3 SLTP. Hal ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di Kota Tanjungpinang.

4.7. Angka Putus Sekolah

Salah satu permasalahan bidang pendidikan adalah tidak selesainya siswa menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Sebagian siswa SD tidak bisa menamatkan hingga lulus SD dan harus keluar sebelum mereka menyelesaikan pendidikan tersebut.

Tabel 4.8. Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin		Rata - Rata
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar / MI / Sederajat	0,02	0,03	0,02
SLTP / MTs / Sederajat	0,08	0,25	0,16
SMA / SMK / MA / Sederajat	0,04	0,07	0,05

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kota Tanjungpinang

4.8. Tenaga Pendidik

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Fasilitas pendidikan yang paling utama adalah gedung sekolah dan guru/pengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah.

Data pada Tabel 4.8. menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio murid-sekolah pada tingkat SD dan SLTP sederajat mengalami peningkatan dikarenakan seiring bertambahnya jumlah murid yang sekolah, sementara jumlah gedung sekolah juga bertambah. Hal berbeda justru terlihat pada tingkat pendidikan SLTA walaupun mengalami penambahan gedung, namun karena peningkatan jumlah murid lebih tinggi, maka rasio murid-sekolah lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4.9. Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011

Indikator	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rasio Murid-Sekolah			
SD/Sederajat	329	341	356
SLTP/Sederajat	378	381	342
SLTA/Sederajat	397	403	446
2. Rasio Murid-Guru			
SD/Sederajat	18	17	17
SLTP/Sederajat	17	17	16
SLTA/Sederajat	13	14	11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

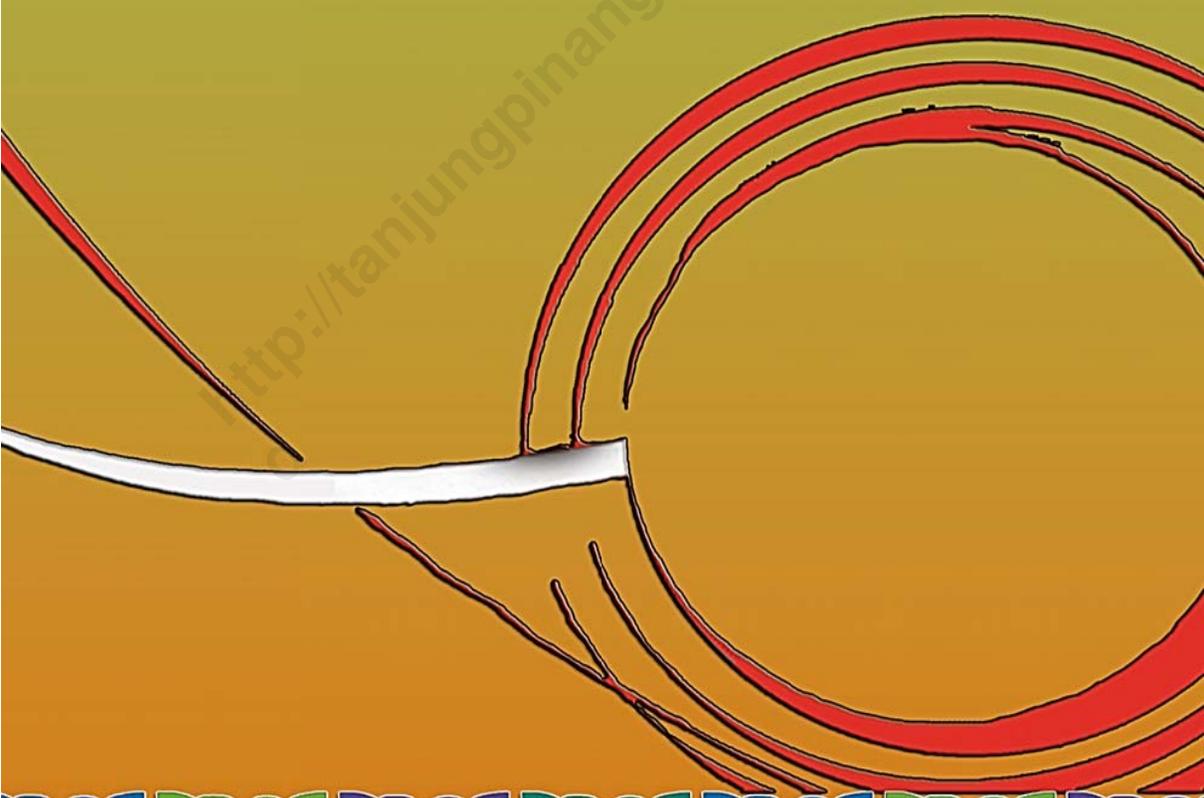
Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar angka rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Demikian juga sebaliknya. Dari data pada Tabel 4.4. terlihat bahwa untuk tingkat SD, SLTP dan SMA, perbandingan jumlah murid terhadap guru semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rasio murid-guru ini sudah cukup baik dengan beban guru untuk mengajar murid rata-rata berkisar 15-17 orang. Semakin baiknya rasio murid-guru tentu tidak terlepas dari komitmen

pemerintah daerah untuk memprioritaskan penambahan tenaga guru untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Tanjungpinang.

Terkait dengan kualitas tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Tanjungpinang, dimana masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan hanya pada bangku SMU/MA/SMK Sederajat, dahulu hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan fasilitas perguruan tinggi yang berkualitas di Kota Tanjungpinang. Sehingga, putra-putri daerah yang memiliki potensi dan berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus pergi keluar daerah. Untuk itu langkah berdirinya perguruan tinggi negeri (PTN) pertama di wilayah ini patut mendapatkan apresiasi. Saat ini terdapat sebuah PTN pertama di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlokasi di Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau yang bernama Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta beberapa sekolah tinggi swasta. Diharapkan melalui PTN tersebut nantinya kualitas pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Tanjungpinang dapat semakin meningkat.



BAB V
KESEHATAN



BAB V

KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, usia harapan hidup, dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat. Untuk itu peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu termasuk dunia usaha. Secara kualitas dan kuantitas, penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga harus terus ditingkatkan.

Menjadi tugas berat bagi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk dapat mencapai visi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, mengingat pembangunan kesehatan menyentuh hampir diseluruh aspek kehidupan manusia dan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah. Program pemerintah yang harus dicapai dalam bidang kesehatan antara lain adalah dengan melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat, menciptakan lingkungan sehat, perilaku atau budaya hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari semua kalangan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Bagi perempuan, kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sesuatu yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dari komitmen Pembangunan Milenium (MDG's). Ada tiga tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan yaitu meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memerangi

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Sementara ada lima tujuan pembangunan tidak terkait secara langsung, salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan. Masalah reproduksi dan nutrisi merupakan masalah kesehatan perempuan, tetapi dalam pandangan yang luas, perempuan memerlukan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan “seutuhnya”, tanpa memandang usia dan status sosial.

Upaya kesehatan di Kota Tanjungpinang sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, adanya keterbatasan dana, sarana dan prasarana menyebabkan hasil pembangunan kesehatan mungkin tidak dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang. Berikut ini adalah beberapa indikator kesehatan yang berperspektif gender.

5.1 Derajat Kesehatan Penduduk (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian ibu, dan Angka Harapan Hidup).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem

rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Angka ini dinyatakan dalam jumlah kematian bayi selama satu tahun per 1000 kelahiran pada tahun yang sama.

Menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi dipengaruhi perubahan kondisi bayi, orangtua (khususnya ibu), dan kondisi perumahan. Data Dinas Kesehatan yang diperoleh dari hasil registrasi (pencatatan) mengenai angka kematian bayi, jumlah bayi lahir, lahir mati, balita mati dan Kematian ibu Tahun 2010-2011 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1. Jumlah Bayi Lahir Hidup, Bayi Lahir Mati, Bayi Mati Setelah Lahir, Balita Mati dan Kematian Ibu di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011

Tahun	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati	Bayi Mati	Balita Mati	Kematian ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	6.030	31	37	41	7
2011	6.596	41	43	50	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Angka kematian Ibu dan bayi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2011 sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 Angka kematian Ibu adalah 121,29 jiwa per 100.000 kelahiran, sedangkan Angka Kematian Bayi mencapai 7,43 jiwa per 1000 kelahiran. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 116,09 jiwa per 100.000 kelahiran untuk Angka Kematian Ibu, dan 6,14 jiwa per 1000 kelahiran hidup untuk Angka Kematian Bayi.

Secara Absolut pada tahun 2011 jumlah kematian bayi juga mengalami peningkatan, yaitu dari 37 bayi pada tahun 2010 menjadi 43 bayi pada tahun 2011. Adapun penyebab utama kematian bayi di Kota Tanjungpinang yaitu Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia (tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur). Namun data yang disajikan di atas belum mencerminkan kondisi angka kematian bayi sesungguhnya mengingat pencatatan masalah kependudukan (lahir, mati, dan pindah) belum dilakukan dengan baik. Keadaan ini diduga pembuatan laporan banyaknya kelahiran, baik yang hidup maupun mati, tidak semuanya tercatat di kelurahan/desa. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh, kurangnya kesadaran dari warga setiap kelurahan untuk melaporkan ke kantor kelurahan.

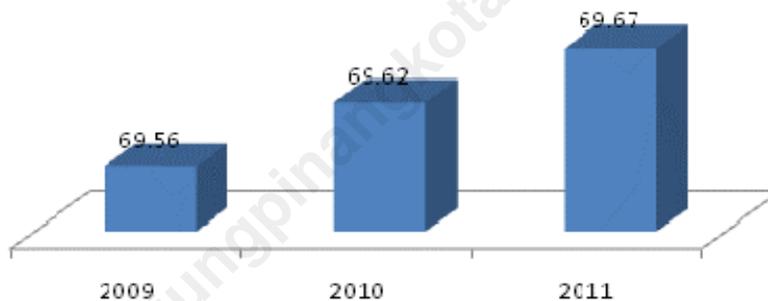
Untuk jumlah kematian ibu secara absolut juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 terjadi 7 kasus kematian ibu menjadi 8 kasus kematian ibu pada tahun 2011. Data Maternal Mortality atau yang biasa dikenal dengan angka kematian ibu adalah informasi yang sangat sulit untuk diperoleh. Data ini sulit diperoleh karena sangat bergantung pada ingatan responden tentang riwayat kematian ibu atau saudara perempuan dan penyebab kematiannya. Asumsi yang digunakan untuk menghitung angka kematian ibu ini adalah kematian perempuan saat melahirkan adalah sebesar 15 persen dari total banyaknya perempuan yang melahirkan. Angka kematian ibu ini

dirumuskan sebagai banyaknya kematian ibu yang terjadi dari proses kelahiran sampai masa nifas dibagi dengan banyaknya perempuan yang melahirkan pada tahun tertentu.

Tabel 5.2 Angka Harapan Hidup Kota Tanjungpinang 2009-2011

Angka Harapan Hidup	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Tanjungpinang	69,56	69,62	69,67

Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup Kota Tanjungpinang 2009-2011



Sumber BPS Kota Tanjungpinang

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan dibidang kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup. Peningkatan tersebut terjadi dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Angka Harapan Hidup secara konsepsi diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya.

Angka harapan hidup di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun selalu bertambah, dimana tahun 2011 adalah 69,67 tahun (bertambah sebesar 0,05 tahun dibandingkan tahun 2010). Angka ini dapat diartikan

bahwa bayi yang lahir pada tahun 2011 diperkirakan akan dapat hidup selama 69,67 tahun dengan syarat besarnya angka kematian dan kondisi kesehatan tidak berubah.

5.2. Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil

Kehamilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh pasangan suami dan istri untuk melanjutkan keturunannya. Ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan teratur. Ibu hamil minimal memeriksakan kehamilannya 4x pada pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kehamilan yaitu: faktor fisik, faktor psikologis dan faktor sosial budaya dan ekonomi. Yang harus diperhatikan adalah bahwa kehamilan bukanlah suatu keadaan patologis yang berbahaya. Status kesehatan ibu hamil dapat diketahui dengan memeriksakan diri dan kehamilannya ke pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas, rumah bersalin, atau poliklinik kebidanan.

5.2.1 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Kunjungan ibu hamil adalah pertemuan (kontak) antara ibu hamil dan petugas kesehatan yang memberi pelayanan antenatal untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu ibu hamil yang datang ke fasilitas pelayanan, tetapi dapat juga sebaliknya yaitu ibu hamil yang dikunjungi petugas kesehatan di rumahnya ataupun di posyandu (Depkes RI, 2005).

Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dapat dipantau dengan pemberian pelayanan terhadap ibu hamil saat kunjungan pertama (K1) dan kunjungan ulangan yang ke empat kali pada semester ke-3 kehamilan (K4). Hasil cakupan K1 menggambarkan tingkat keaktifan petugas pelayanan kesehatan dan cakupan K4 menggambarkan tingkat peran serta masyarakat. Secara jelas kunjungan K-4 adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk

mendapatkan pemeriksaan kehamilan, dengan distribusi kontak sebagai berikut : minimal 1 kali pada triwulan I, minimal 1 kali pada triwulan II, dan minimal 2 kali pada triwulan III (Depkes RI, 1995).

Tabel 5.3, menggambarkan jumlah kunjungan ibu hamil ke Nakes, dimana kunjungan pertama ibu hamil (K1) dan kunjungan keempat (K4) selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah ibu hamil dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2011 ini jumlah ibu hamil sebanyak 6.592 orang bertambah dari tahun 2010 yang hanya sebanyak 6.312 orang. Untuk Jumlah Kunjungan ibu hamil (K1) dan (K4) pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 6.364 orang dan 5.986 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2010 yang masing-masing berjumlah 6.056 orang dan 5.713 orang.

Tabel 5.3. Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Nakes di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011

Tahun	K 1	K 4
(1)	(2)	(3)
2010	6.056	5.713
2011	6.364	5.986

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

5.2.2 Ibu hamil yang Mendapat Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) termasuk WUS dan Tablet Zat Besi (Fe)

Pada saat pemeriksaan kehamilan, ibu hamil diberi suntikan *tetanus toxoid* (TT). Pemberian vaksin (*toxoid*) melalui suntikan, diperlukan untuk melindungi ibu hamil saat bersama bayinya terhadap tetanus neonatorum (tetanus saat nifas). Ibu hamil yang belum pernah mendapat imunisasi TT pada kehamilan sebelumnya atau pada waktu akan menjadi pengantin, maka perlu mendapat dua kali suntikan TT dengan jarak minimal satu bulan. Imunisasi TT yang pertama diberikan pada

kunjungan antenatal yang pertama. Bila sudah pernah, maka cukup diberikan sekali selama kehamilan.

Guna meningkatkan kesehatan ibu hamil maka ibu hamil diberi tambahan Zat besi. Zat besi penting untuk mengompensasi peningkatan volume darah yang terjadi selama kehamilan, dan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang kuat. Kebutuhan akan zat besi meningkat selama kehamilan, seiring dengan pertumbuhan janin. Ibu hamil dapat memenuhi kebutuhan zat besinya yang meningkat selama kehamilan dengan meminum tablet tambah darah, dan dengan memastikan bahwa ia makan dengan cukup dan seimbang. Makanan yang mengandung banyak zat besi antara lain daging, terutama hati dan jeroan, telur, polong kering, kacang tanah, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau seperti bayam, sawi hijau, dan lain-lain (Pusdiknakes, 2003).

Tabel 5.4. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi TT dan Zat Besi di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011

Tahun	Imunisasi TT	Tablet Zat Besi
(1)	(2)	(3)
2010	3.676	5.475
2011	4.711	6.189

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data dari dinas kesehatan jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TT pada tahun 2011 sebanyak 4.711 orang bertambah dari tahun 2010 yang hanya sebanyak 3.676 orang. Cakupan pendistribusian tablet zat besi pada ibu hamil dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. Pada tahun 2011 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi sebanyak 6.189 orang bertambah dari tahun 2010 yang hanya sebanyak 5.475 orang.

5.3. Saranan dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk yaitu dengan melakukan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dan mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan. Akses yang mudah dan biaya yang murah menjadi syarat utama kehadiran fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2011 di Kota Tanjungpinang terdapat 2 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, 12 Puskesmas Pembantu (PUSTU), 5 Pondok bersalin desa, 10 Rumah Bersalin, 24 Balai Pengobatan, 6 Laboratorium, 15 Optikal, 30 Apotik, 48 Toko Obat dan 4 Poskeskel. Jumlah ini agaknya masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang mengingat pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang yang terus meningkat.

Tabel 5.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Fasilitas di Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rumah Sakit	2	2
2.	Puskesmas	6	6
3.	Puskesmas Pembantu	12	12
4.	Pondok Bersalin Desa	6	5
5.	Rumah Bersalin	11	10
6.	Balai Pengobatan	22	24
7.	Laboratorium	6	6
8.	Optikal	12	15
9.	Apotik	29	30
10.	Toko Obat	45	48
11.	Poskeskel	2	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

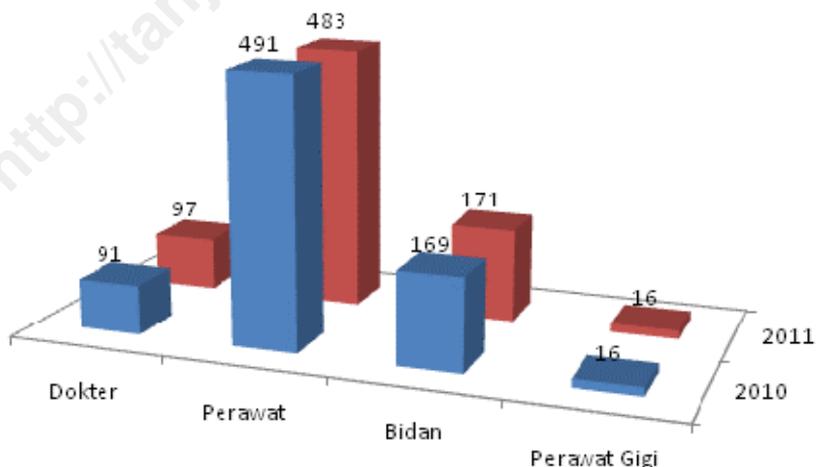
Tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan dan persebarannya harus semakin diperluas sampai ke tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Suatu

indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah kesehatan dan pertambahan jumlah penduduk adalah rasio tenaga kesehatan. Dari tabel 5.6 dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang signifikan pada angka rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2011, setiap 10.000 penduduk tersedia 5 orang dokter, 24 perawat, 9 bidan, dan 1 Perawat gigi.

Tabel 5.6. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk tahun 2010-2011

Tenaga Kesehatan	Jumlah		Rasio per 10.000 penduduk	
	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	91	97	5	5
Perawat	491	483	26	24
Bidan	169	171	9	9
Perawat Gigi	16	16	1	1

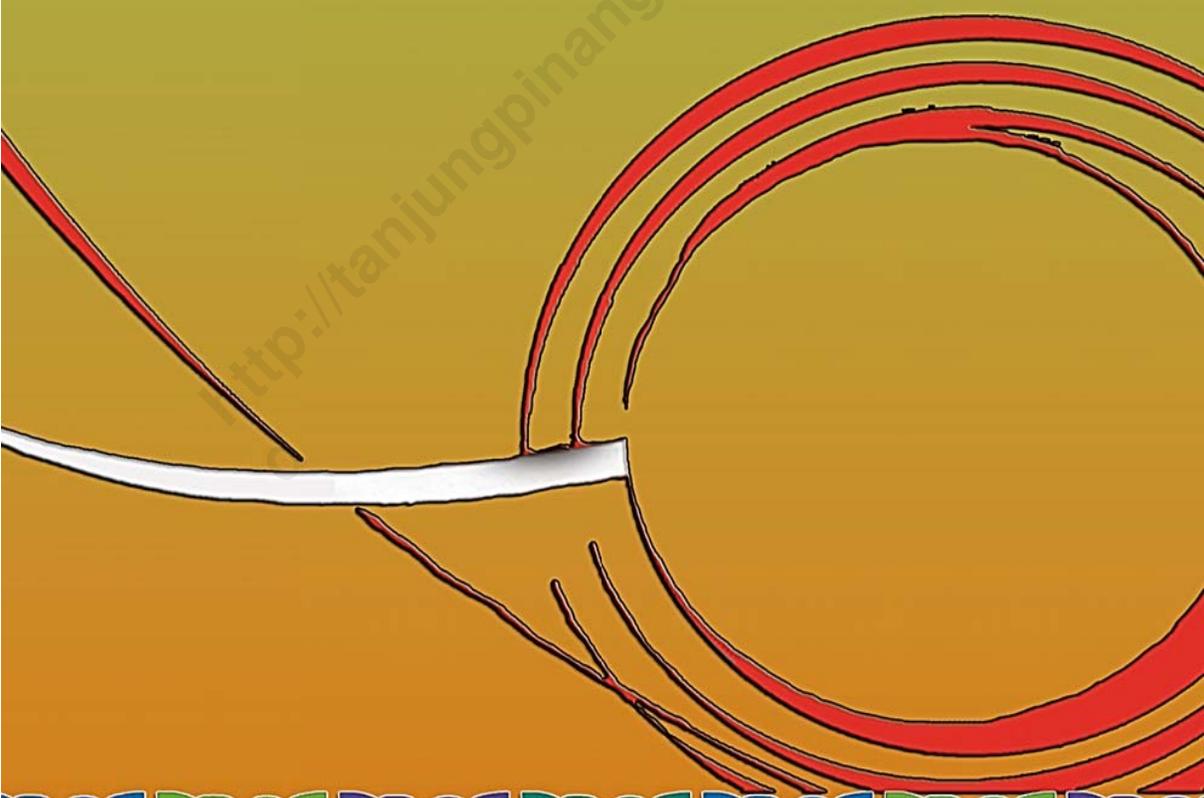
Gambar 5.2. Jumlah Tenaga Kesehatan tahun 2010-2011



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang



BAB VI
KETENAGAKERJAAN



<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



BAB VI KETENAGAKERJAAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 21 dan 27 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membedakan laki-laki atau perempuan dalam bidang pekerjaan, politik, dan hukum. Faktanya, apa yang telah dinyatakan dalam UUD 1945 tersebut belum berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak mengherankan apabila kesempatan memperoleh pekerjaan di sektor-sektor tertentu antara perempuan dan laki-laki masih timpang dengan imbalan atau upah yang diterima tidak sama. Terbatasnya akses perempuan untuk berusaha/bekerja di bidang ekonomi termasuk dalam mendapatkan modal dan pelatihan usaha sudah merupakan salah satu masalah yang telah diangkat dalam *World Conference on Women* di Beijing 1995.

Masalah ketenagakerjaan perempuan dalam kerangka pembangunan berperspektif gender sampai saat ini masih merupakan isu yang paling kerap dibicarakan. Ketimpangan atau ketidakadilan gender banyak tercermin di dunia kerja. Isu yang muncul misalnya masih adanya diskriminasi upah yang lebih rendah, dan tidak diindahkannya kondisi kodrati perempuan seperti haid, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu isu kualitas tenaga kerja perempuan biasanya berhubungan dengan masalah masih rendahnya pendidikan mereka, sehingga menjadi sasaran bagi perusahaan yang berorientasi buruh murah.

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan terutama yang berperspektif gender, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Indikator ketenagakerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka

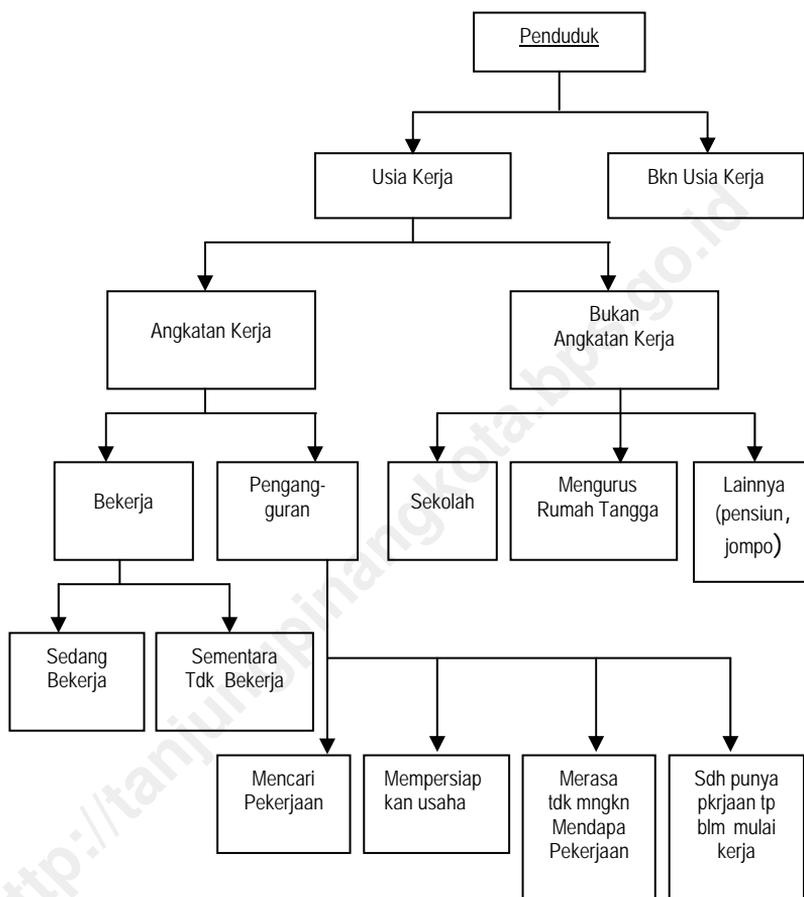
peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, banyaknya pengangguran tersebut akan mengakibatkan banyak terjadinya masalah sosial.

Dalam era otonomi daerah saat ini, data dan indikator ketenagakerjaan memberikan peranan yang besar dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan mengetahui indikator ketenagakerjaan suatu daerah, diharapkan dapat diketahui besarnya potensi penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga pada akhirnya, dapat diperkirakan output yang dihasilkan.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan BPS dalam Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) menggunakan Standard Labour Force Concept atau konsep dasar angkatan kerja yang dipakai International Labour Organization (ILO). Dalam pendekatan ini, penduduk dikelompokkan menjadi golongan seperti yang tercantum dalam gambar 6.1. Dan pengukuran ini didasarkan pada *time reference* kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penduduk usia kerja mengacu pada usia 15 tahun keatas.

Dalam hal bekerja, terlibatnya perempuan terjadi karena keharusan bekerja atau karena memilih untuk bekerja. Namun karena "stereotip" perempuan adalah mengurus rumah tangga, mengurus anak dan mengurus hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan rumah, maka lapangan pekerjaan yang tersedia untuk perempuan pun terbatas jumlahnya, karena harus sesuai dengan sifat dan kompetensi perempuan. Aspek ketenagakerjaan yang dibahas antara lain mengenai partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja, serta keadaan buruh/karyawan.

Gambar 6.1 Diagram Ketenagakerjaan



6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan, baik

yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

Menurut konsep dari ILO, yang masuk ke dalam angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya masuk kategori sebagai bukan angkatan kerja. TPAK ini dapat menggambarkan secara kasar tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari pekerjaan yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang maupun barang.

Semakin banyaknya penduduk usia kerja yang siap kerja (bukan penduduk usia kerja yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) maka nilai TPAK akan semakin tinggi. Oleh karena itu, apabila tingkat partisipasi sekolah dari penduduk usia kerja semakin tinggi, maka nilai TPAK akan semakin rendah. Apabila semakin banyak wanita yang bekerja, maka nilai TPAK akan semakin tinggi. Namun apabila semakin banyak wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga, daripada bekerja, maka nilai TPAK akan semakin turun.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja	83,07	44,58	64,28
1.1 Bekerja	77,06	40,66	59,29
1.2 Mencari kerja	6,01	3,92	4,99
II. Bukan Angkatan Kerja	16,93	55,42	35,72
2.1 Sekolah	8,49	7,02	7,77
2.2 Mengurus Rumahtangga	4,25	46,54	24,89
2.3 Lainnya	4,19	1,86	3,06
Total (I + II)	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakernas 2011

Berdasarkan Tabel 6.1, persentase penduduk yang masuk angkatan kerja sebanyak 64,28 persen, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 63 persen. Apabila dilihat perspektif gendernya, angkatan kerja penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerjanya. sedangkan pada penduduk perempuan posisi ini terbalik, persentase bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini mengakibatkan jumlah angkatan kerja penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan sedangkan jumlah bukan angkatan kerja penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan sehingga TPAK Laki-laki lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan.

Secara keseluruhan, penduduk usia kerja perempuan 46,54 persen mengurus rumahtangga, kemudian yang bekerja sebanyak 40,66 persen dan penduduk perempuan yang sekolah yaitu sekitar 7,02 persen sedangkan penduduk laki-laki yang sudah masuk usia kerja 77,06 persen bekerja kemudian 8,49 persen sekolah dan 6,01 persen mencari pekerjaan. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bias gender antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan sesuai kodratnya lebih banyak yang mengurus rumahtangga dibandingkan yang bekerja sedangkan laki-laki sebaliknya, lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan yang mengurus rumahtangga.

TPAK penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2011 sebesar 64,28 persen (Tabel 6.1), artinya dari tiap 100 orang penduduk Kota Tanjungpinang usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang merupakan orang yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan, selebihnya adalah mereka yang mempunyai kegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, jompo).

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka terlihat bahwa TPAK laki-laki (83,07 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (44,58

persen). Besarnya TPAK laki-laki ini tentu tidak terlepas dari peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dengan menjadi kepala rumah tangga, seorang laki-laki dituntut untuk menghidupi keluarganya dengan cara bekerja. Sebaliknya untuk perempuan, dengan statusnya sebagai seorang istri, perempuan yang sudah menikah akan cenderung memilih mengurus rumah tangga daripada harus keluar rumah untuk bekerja.

6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Angka tersebut sering juga disebut dengan Angka Pengangguran Terbuka (APT).

Pengangguran (unemployed) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Namun demikian, mulai tahun 2001, konsep tersebut sedikit dilonggarkan sesuai dengan rekomendasi ILO. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan ekonomis (merasa tidak akan memperoleh pekerjaan atau sedang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai) dikategorikan sebagai pengangguran.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, akan tetapi belum mulai bekerja. Jadi dari kategori ini sangat jelas terlihat bahwa dimensi pengangguran terbuka sangat luas, tidak hanya sekedar mereka yang sedang mencari pekerjaan saja. Konsep ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja juga masuk sebagai pengangguran terbuka.

Salah satu tantangan besar pemerintah dewasa ini adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja

yang cenderung meningkat seiring dengan perubahan struktur umur penduduk dari waktu ke waktu. Untuk itu, indikator tingkat pengangguran ini menjadi sangat penting apalagi sejak krisis moneter tahun 1997. Angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan belum dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pengangguran memberikan dampak yang negatif bagi pembangunan karena tingkat pengangguran yang tinggi akan mendorong banyak muncul masalah sosial dan masalah kemiskinan hingga kriminalitas.

Dalam menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zone*), salah satu masalah yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah bagaimana meminimalkan tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka. Karena dengan masuknya investor ke wilayah Kota Tanjungpinang, peluang penduduk Tanjungpinang untuk kembali bekerja semakin terbuka lebar. Selain itu, permasalahan yang juga harus diperhatikan adalah penduduk dengan status setengah pengangguran dan bahkan pengangguran tidak kentara, karena pekerja pada kategori ini mempunyai tingkat produktivitas yang rendah.

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja menurut jenis kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja	83,07	44,58	64,28
1.1 Bekerja	77,06	40,66	59,29
1.2 Mencari kerja	6,01	3,92	4,99
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,80	9,64	8,41
Tingkat Kesempatan Kerja	92,2	90,36	91,59

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakernas 2011

Besarnya tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Berdasarkan hasil Sakernas ini, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungpinang sebesar 8,41 persen. Angka ini turun 3,17 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010. Sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tanjungpinang sebesar 91,59 persen.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata tingkat pengangguran perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran perempuan mencapai 9,64 persen sedangkan tingkat pengangguran laki-laki hanya 7,80 persen. Tingginya pengangguran perempuan ini diduga karena terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan, meskipun di negara maju sekalipun. Pekerjaan terkonsentrasi pada 25 lapangan usaha dan itupun hanya dimasuki oleh sedikit wanita. Pekerjaan wanita selalu dihubungkan dengan sektor domestik, jika ia bekerja maka tidak jauh dari pekerjaan rumah tangga seperti : bidan, perawat, guru dan sekretaris yang lebih banyak memerlukan keahlian manual saja.

6.3. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut bertumpu. Struktur perekonomian akan berubah seiring dengan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah dikategorikan belum berkembang biasanya karena didominasi oleh sektor pertanian dan daerah yang mulai maju cenderung didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Untuk itu dukungan pemerintah juga sangat berpengaruh untuk mengembangkan perekonomian Kota Tanjungpinang. Adanya kebijakan pemerintah untuk memacu investor, penciptaan iklim usaha yang kondusif,

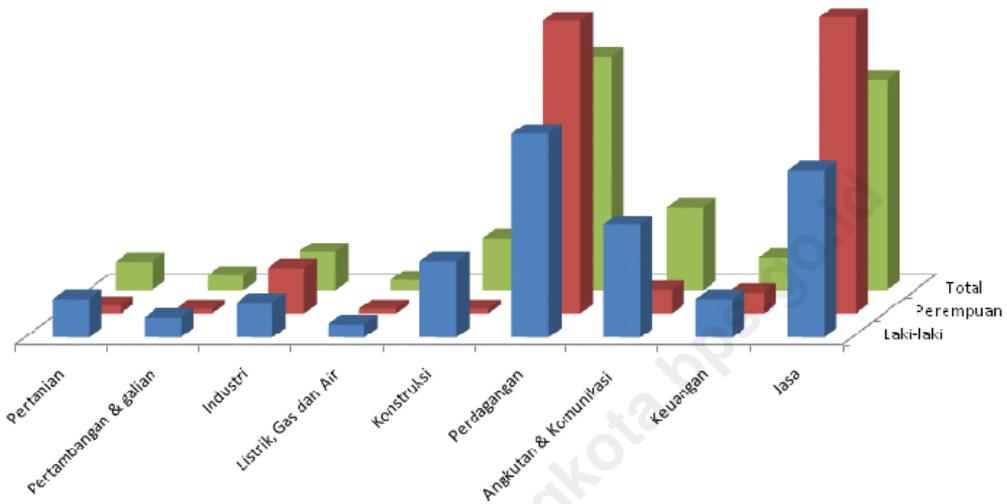
dan kebijakan dalam memberikan kemudahan memberikan ijin berbagai jenis usaha akan mendorong adanya investasi yang akan ditanamkan. Dengan adanya investasi tersebut diharapkan dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk bekerja, selain itu juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang.

Secara umum pekerjaan yang digeluti sebagian besar penduduk Kota Tanjungpinang berada pada sektor perdagangan. Persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan ada sebanyak 33,18 persen. Sebagian besar dari pekerja pada sektor tersebut adalah penduduk perempuan yaitu 41,62 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sekitar 28,94 persen. Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3. Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Tanjungpinang, 2011

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	5,46	1,17	4,02
2. Pertambangan & galian	2,81	0,73	2,11
3. Industri	4,95	6,51	5,47
4. Listrik, Gas dan Air	1,86	0,73	1,48
5. Konstruksi	10,81	0,73	7,44
6. Perdagangan	28,94	41,62	33,18
7. Angkutan & Komunikasi	16,01	3,41	11,80
8. Keuangan	5,47	3,01	4,65
9. Jasa	23,69	42,10	29,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Gambar 6.2. Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Tanjungpinang, 2011



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakernas 2011

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa lapangan usaha lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa. Sektor jasa ini mencakup administrasi pemerintahan, pertahanan dan wajib sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan, jasa perorangan, dan badan internasional atau badan ekstra internasional. Persentase tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini mencapai 29,85 persen, yang terdiri dari laki-laki sebesar 23,69 persen dan perempuan 42,10 persen.

Jika dilihat berdasarkan perspektif gender, untuk penduduk laki-laki pekerjaan yang paling banyak digeluti pada sektor perdagangan dan diikuti dengan sektor jasa. Untuk penduduk perempuan berlaku sebaliknya, dimana pekerjaan yang paling banyak digeluti pada sektor jasa dan diikuti dengan sektor perdagangan.

6.4. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Jika dilihat dari status dalam pekerjaan dibedakan menjadi sektor formal dan informal. Sektor formal ditandai dengan jam kerja tetap, upah gaji tetap, serta adanya keterikatan dan aturan yang jelas dalam bekerja. Di Kota Tanjungpinang sektor formal lebih banyak menyerap angkatan kerja dimana sebanyak 76,82 persen penduduk Kota Tanjungpinang bekerja di sektor formal dan kebanyakan berstatus sebagai pegawai, karyawan maupun buruh. Sedangkan sektor informal ditandai dengan kemudahan bagi siapapun untuk memasukinya, tidak diperlukan pendidikan khusus untuk dapat berkecimpung dalam sektor tersebut dan biasanya tidak tersentuh oleh kebijakan kredit perbankan, ternyata mampu menyerap 23,18 persen, laki-laki sebanyak 23,74 persen dan perempuan sebanyak 26,02 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, perempuan yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di dunia kerja sebagian besar belum diakui eksistensinya.

Tabel 6.4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk angkatan kerja laki-laki yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (68,48 persen) dan berusaha sendiri (18,20 persen), sedangkan perempuan yang berstatus buruh/karyawan (69,72 persen) dan berusaha sendiri (16,16 persen). Hal ini terlihat sekali perbedaannya antara pekerja laki-laki dan perempuan. Perbedaan lain yang cukup mencolok terlihat sekali pada status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar dimana pekerja perempuan sebesar 5,87 persen sedangkan pekerja laki-laki hanya 0,61 persen.

Tabel 6.4. Penduduk 15 tahun Ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Tanjungpinang Tahun 2011

Status Pekerjaan (1)	Penduduk 15 Tahun ke Atas		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Buruh/Karyawan/Pegawai Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	68,48	69,72	68,89
Sektor Formal	76,26	73,98	76,82
Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Di bayar Pekerja bebas di Pertanian Pekerjaan Bebas Di Non Pertanian Pekerja keluarga	18,20 1,44 <0,01 1,50 0,60	16,16 1,41 0,85 1,73 5,87	17,52 1,43 0,29 1,57 2,37
Sektor Informal	23,74	26,02	23,18
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakernas 2011

6.5. Penduduk Bekerja menurut Jenis pekerjaan Utama

Jenis pekerjaan utama adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja atau ditugaskan kepada mereka yang bekerja. Pengklasifikasian pekerja berdasarkan jenis pekerjaan utamanya menggunakan klasifikasi baku pekerjaan indonesia (KBJI).

Apabila dilihat penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama, untuk pekerja perempuan paling banyak bertindak sebagai pejabat pelaksanaan Tata Usaha yaitu sekitar 23,41 persen, diikuti dengan Tenaga Usaha Jasa juga sebesar 23,41 persen dan Tenaga Usaha Penjualan sebesar 22,43 persen. Hal ini sejalan dengan sektor jasa dan perdagangan merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh penduduk perempuan di Kota Tanjungpinang dan biasanya untuk jenis pekerjaan tersebut, perempuan lebih cocok dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan

lebih teliti dan lebih menarik. Sedangkan untuk pekerja laki-laki, paling banyak bertindak sebagai tenaga produksi, yaitu sebesar 40,25 persen, kemudian paling banyak kedua yaitu sebagai tenaga usaha penjualan yaitu sebanyak 18,77 persen dan terbanyak ketiga yaitu sebagai pejabat pelaksana tata usaha yaitu sebesar 12,96 persen.

Tabel 6.5. Penduduk 15 tahun Ke atas yang Bekerja menurut Jenis pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011

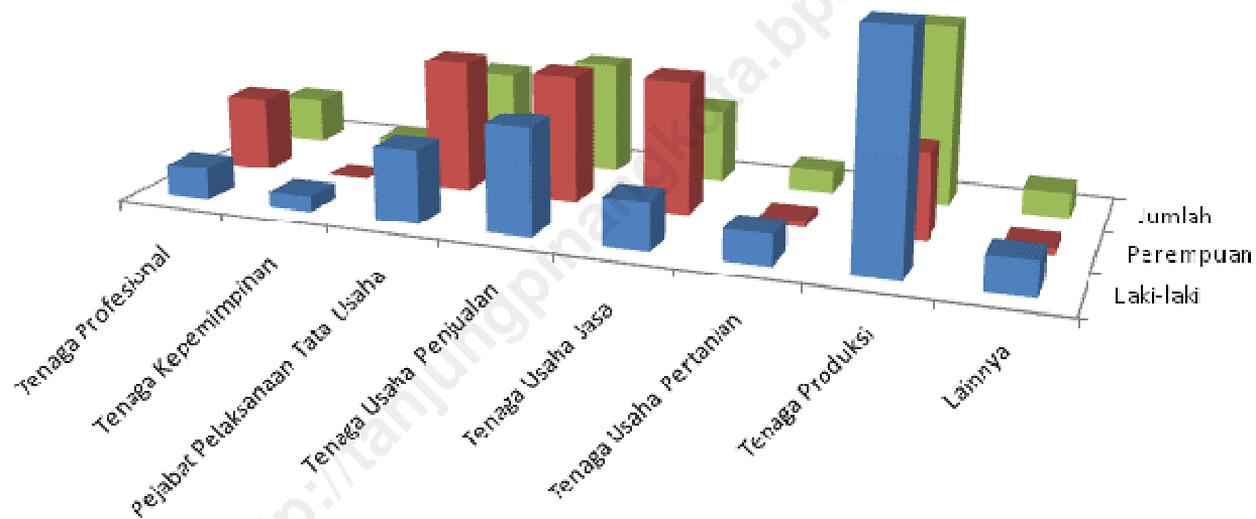
Jenis Pekerjaan Utama	Penduduk 15 Tahun ke Atas		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tenaga Profesional	5,72	13,21	8,23
2. Tenaga Kepemimpinan	2,69	<0,01	1,79
3. Pejabat Pelaksanaan Tata Usaha	12,96	23,41	16,45
4. Tenaga Usaha Penjualan	18,77	22,43	19,99
5. Tenaga Usaha Jasa	8,34	23,41	13,39
6. Tenaga Usaha Pertanian	5,33	1,17	3,94
7. Tenaga Produksi	40,25	15,14	31,84
8. Lainnya	5,95	1,24	4,37
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakerda 2010

Fenomena menarik, dapat ditunjukkan pada pekerja yang bertindak sebagai tenaga profesional, dimana pekerja perempuan yang bertindak sebagai tenaga Profesional lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki dengan perbandingan 13,21 persen berbanding 5,72 persen pada penduduk laki-laki. Namun jika melihat pada tenaga kepemimpinan, pekerja laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan perbandingan 2,69 persen berbanding kurang dari (<)0,01 persen pada penduduk perempuan.

Untuk Tenaga Usaha pertanian, jumlah pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan perbandingan 5,33 persen berbanding 1,17 persen pada penduduk perempuan. keadaan tersebut sangat wajar, karena jenis pekerjaan tersebut membutuhkan keadaan fisik yang kuat sehingga laki-laki lebih cocok dibanding perempuan.

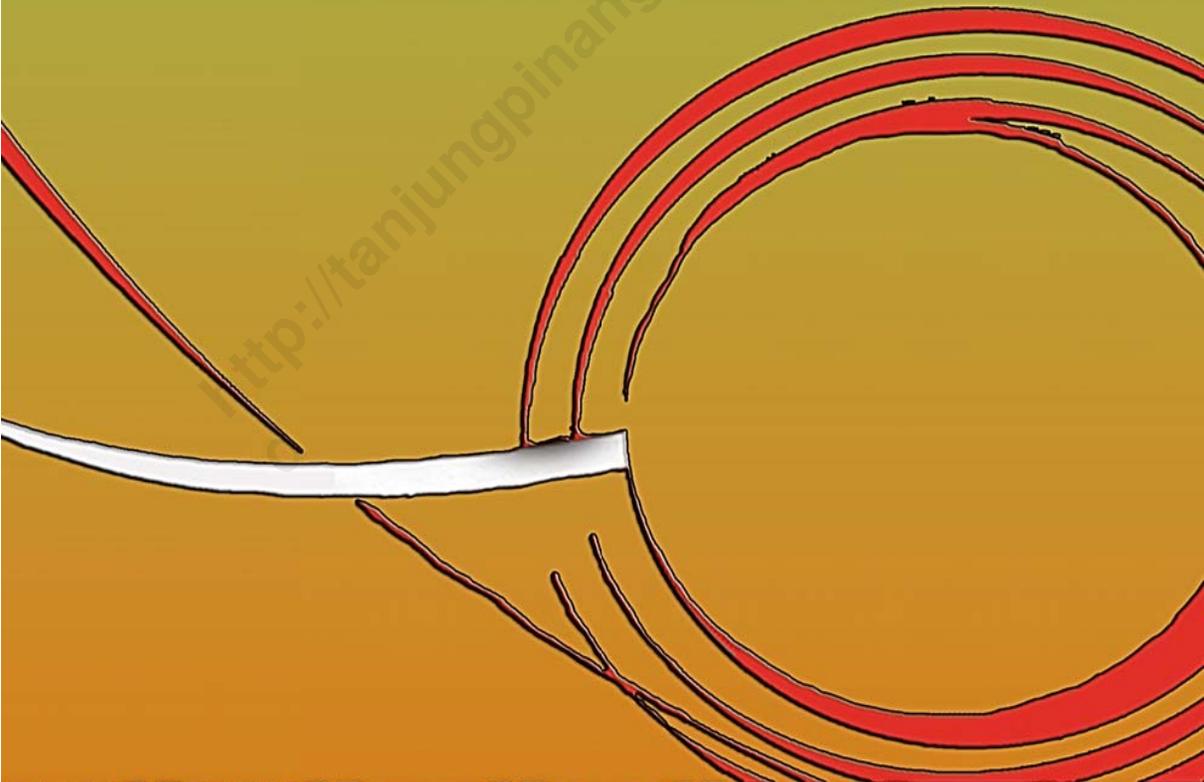
Gambar 6.3. Penduduk 15 tahun Ke atas yang Bekerja menurut Jenis pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah dari hasil Sakerda 2010



BAB VII
SEKTOR PUBLIK



BAB VII SEKTOR PUBLIK

Secara legal, persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dari segi hukum, pencapaian kesetaraan gender tidak ada hambatan. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 28.b Ayat 2 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Perempuan dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional serta memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menikmati hasil pembangunan. Namun demikian, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, masih ditemukan banyak kendala dan keraguan. Peran perempuan dalam berbagai sektor publik (kemasyarakatan) masih banyak terhambat oleh alasan budaya, tradisi, dan tata nilai yang telah melembaga di masyarakat.

Kiprah perempuan di Indonesia pada sektor publik masih tergolong rendah. Rendahnya peran perempuan ini diantaranya disebabkan adanya sikap atau pandangan bahwa perempuan hanya bertugas melakukan kegiatan yang sifatnya reproduktif, yaitu hanya berkaitan dengan pemeliharaan, pengembangan, serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dalam keluarga. Dengan demikian, hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan di masyarakat yang sifatnya membatasi peran perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam hal gender dan peran serta perempuan harus dimulai dari merubah cara pandang tentang perempuan sebagai pengurus rumah tangga menjadi partner kerja yang setara dengan tetap mengetahui segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki.

Seiring dengan perkembangan iklim sosial budaya yang kondusif, pandangan kaum perempuan telah banyak mengalami kemajuan. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak pembangunan bangsa. Perempuan telah banyak berpartisipasi di sektor publik, sebagai eksekutif atau bergerak di dunia politik.

7.1. Politik dan Legislatif

Undang-Undang Pemilu Nomor 12 tahun 2000 telah memberikan peluang adanya keterwakilan politik perempuan dalam parlemen. Akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam parlemen belum dapat mencapai 30 persen. Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik yang direpresentasikan dalam lembaga legislatif tergolong rendah. Dari hasil Pemilu 2009 lalu, perempuan yang sesungguhnya menjadi kelompok pemilih paling besar secara nasional tidak lebih dari komoditas politik.

Kuota perempuan di parlemen sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu tidak tercapai karena berbagai persoalan mendasar. Suatu persoalan yang sangat terkait dengan kultur patriarki, bahwa aktifitas politik identik dengan laki-laki. Oleh sebab itu, sekalipun perempuan didorong untuk terlibat aktif dalam politik, partai politik sebagai wahana transformasi politik belum menunjukkan sikap akomodatif perempuan.

Dalam pemilihan anggota legislatif tingkat nasional maupun daerah pada Pemilu 2009 lalu, nomor urut calon-calon anggota legislatif (caleg) perempuan ditempatkan nomor bawah. Situasi ini mendorong munculnya sebutan "caleg nomor sepatu" karena nomor urut caleg perempuan di sekitar angka 36 dan seterusnya sesuai dengan ukuran sepatu.

Anggota dewan yang duduk dilembaga legislatif merupakan representasi masyarakat dalam menentukan tata penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama agar aspirasi kaum laki-laki dan kaum perempuan dapat disampaikan melalui wakilnya yang duduk dilembaga legislatif.

Tabel 7.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, Masa Jabatan 2009 - 2014

Partai Politik (1)	Perempuan (2)	Laki-Laki (3)	Jumlah (4)
1. Demokrat	-	3	3
2. Golongan Karya	-	3	3
3. Patriot	-	0	0
4. Amanat Nasional	-	3	3
5. Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	4	4
6. Keadilan Sejahtera	1	2	3
7. Persatuan Pembangunan	-	2	2
8. Persatuan Demokrasi Kebangsaan	-	1	1
9. Kebangkitan Bangsa	-	0	0
10. Hati Nurani Rakyat	-	1	1
11. Karya Peduli Bangsa	-	1	1
12. Perjuangan Indonesia Baru	1	1	2
13. Demokrasi Pembaruan	1	0	1
10. Kebangkitan Nasional Ulama	-	1	1
Jumlah	3	22	25

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan komposisi jumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang dalam periode 2009-2014, jumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang sebanyak 25 orang, namun perwakilan perempuan dalam legislatif tersebut masih sangat kecil, padahal pemilih perempuan cukup banyak.

Dari 25 anggota DPRD Kota Tanjungpinang, hanya 3 orang atau dengan kata lain keterwakilan perempuan di DPRD hanya 12 persen saja yaitu 1 orang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, 2 orang lagi berasal dari Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Demokrasi Pembaruan.

Dengan perolehan demikian, terlihat bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan anggota legislatif di daerah masih belum dianggap sebagai usaha memberdayakan perempuan dalam arti luas. Dengan tidak terwakilinya kuota 30 persen suara perempuan dalam jabatan politis ini, maka akan sulit kiranya untuk dapat mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Kalaupun ada, kebijakan-kebijakan yang 'berpihak' kepada kaum perempuan tidak akan optimal.

7.2. Yudikatif

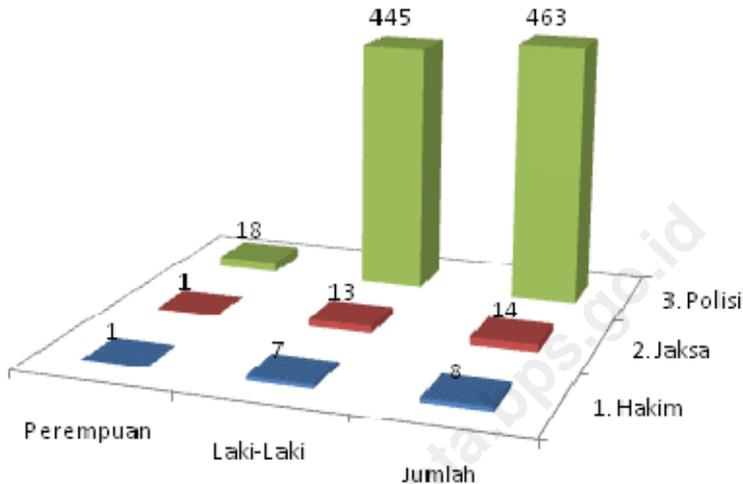
Teori Trias Politika, meletakkan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagai sistem check and balances. Peran lembaga yudikatif dalam check and balances itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tabel 7.2. Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011

Lembaga Yudikatif (1)	Perempuan (2)	Laki-Laki (3)	Jumlah (4)
1. Hakim	1	7	8
2. Jaksa	1	13	14
3. Polisi	18	445	463
Jumlah	20	465	485

Sumber : Pengadilan, Kejaksaan dan Polres Kota Tanjungpinang.

Gambar 7.1. Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2011



Sumber : Pengadilan, Kejaksaan dan Polres Kota Tanjungpinang.

Seperti halnya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di lembaga legislatif, jumlah perempuan yang berkarir dan menduduki jabatan strategis di lembaga yudikatif juga masih tergolong rendah. Di lembaga peradilan misalnya, hakim yang memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara, masih lebih banyak hakim laki-laki dari pada hakim perempuan, dimana jumlah hakim laki-laki sebanyak 7 orang sedangkan hakim wanita hanya 1 orang.

Mitra hakim dalam menegakkan prinsip keadilan adalah jaksa. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, pada tahun 2011 Kota Tanjungpinang memiliki 14 orang jaksa, pada tahun tersebut 1 orang jaksa perempuan dan 13 orang jaksa laki-laki.

Dunia dan pekerjaan hakim dan jaksa tidak sempurna bila tidak melibatkan aparat kepolisian. Sinergi hakim, jaksa dan polisi merupakan sistem yang harus dibangun untuk menegakkan keadilan, mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang dan

menumbuhkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan aparat kepolisian sangat diperlukan untuk menjamin keamanan di setiap sudut kota. Selain memberi rasa aman, kehadiran polisi di tengah masyarakat juga dapat menjadi indikator dinamisnya gerak hidup masyarakat.

Berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur yang berada ditingkat kota/kabupaten. Berdasarkan data dari Polresta Kota Tanjungpinang tahun 2011 terdapat 463 polisi dari berbagai tingkat kepangkatan yang bertugas di wilayah hukum Kota Tanjungpinang. Jika dilihat berdasarkan perspektif gender jumlah polisi laki-laki jauh lebih besar dari perempuan. Dimana terdapat 465 polisi laki-laki dan 18 polisi wanita.

7.3. Eksekutif

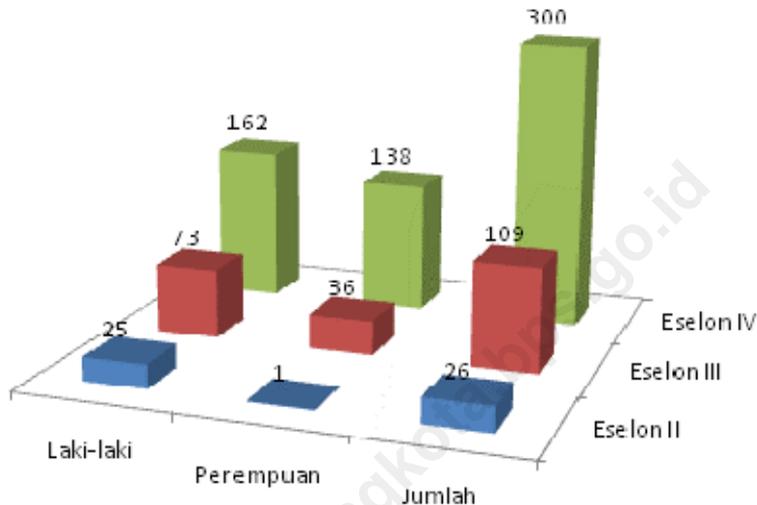
Peranan perempuan selain sebagai politisi di bidang legislatif juga berperan dalam kehidupan kemasyarakatan dalam bidang eksekutif. Peranan perempuan di bidang eksekutif tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan. Peran perempuan ini mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan yang mendukung kesetaraan gender bila menduduki posisi strategis sebagai penentu kebijakan.

Tabel 7.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang 2011

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	25	1	26
Eselon III	73	36	109
Eselon IV	162	138	300
Jumlah	260	175	435

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang

Gambar 7.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang 2011



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang, Jumlah PNS berdasarkan eselon di Kota Tanjungpinang pada tahun 2011 masih didominasi oleh PNS Laki-laki. Jumlah keseluruhan PNS berdasarkan eselon di Kota Tanjungpinang sebanyak 435 orang, yang terdiri dari perempuan sebanyak 175 orang dan laki-laki sebanyak 260 orang.

Jika dilihat menurut eselon, untuk pegawai negeri sipil eselon II, di mana jumlahnya mencapai 26 orang, terdiri dari 25 orang laki-laki, dan hanya 1 orang perempuan. Untuk eselon III terdapat 73 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil eselon IV, yang jumlahnya mencapai 300 orang, terdiri dari 162 laki-laki dan 138 perempuan.

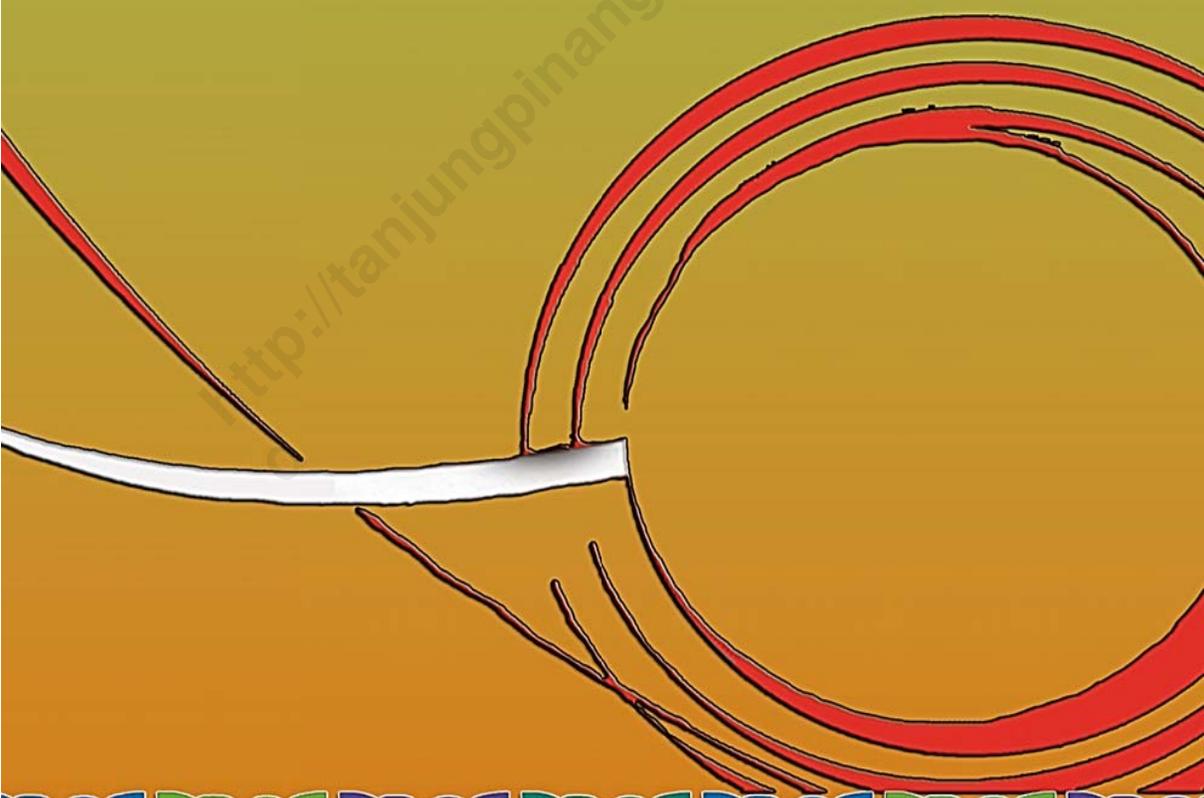
Ditingkat eksekutif yaitu jajaran aparatur negara yang menentukan kebijakan pembangunan pada wilayah kekuasaannya pada

tahun 2011, dari 4 kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang 3 kecamatan dipimpin oleh laki-laki, dan 1 dipimpin oleh perempuan yaitu kecamatan Tanjungpinang Barat. Untuk lurah, dari 18 kelurahan, 13 diantaranya dipimpin oleh laki-laki dan sisanya dipimpin oleh perempuan. Sedangkan Untuk walikota di kota tanjungpinang berasal dari kaum perempuan.

<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



BAB VIII
KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PERUMAHAN



BAB VIII

KESEHATAN LINGKUNGAN dan PERUMAHAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan individu adalah kesehatan lingkungan sekitar dan perumahan. Jika seseorang tinggal di lingkungan dan rumah yang sehat maka tentunya peluang orang tersebut untuk sehat akan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di lingkungan dan rumah yang tidak sehat.

Penilaian terhadap kondisi perumahan dan pemukiman suatu masyarakat dapat dilihat melalui satu paket indikator yang menurut UNCHS (1993) terbagi dalam 6 modul :

1. Kemampuan memiliki rumah
2. Pembiayaan Perumahan
3. Kualitas Perumahan
4. Produksi Perumahan
5. Subsidi Perumahan
6. Pemeriksaan Pengaturan Perumahan

Dari keenam modul indikator tersebut yang paling banyak dan bisa dikumpulkan melalui survei atau sensus dengan pendekatan rumah tangga adalah modul kemampuan memiliki rumah dan kualitas perumahan. Sedangkan modul yang lainnya harus melibatkan pendekatan institusi dan data registrasi/administrasi, yang biasanya data sulit didapat dan tidak konsiten.

Khusus untuk publikasi Statistik dan Analisis Gender 2012 ini, indikator yang dipilih lebih ditekankan pada yang bisa dikumpulkan melalui pendekatan rumah tangga, utama nya yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hasil Susenas dapat dibentuk empat kelompok indikator perumahan dan pemukiman, yaitu kondisi fisik

bangunan, penguasaan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal, dan kondisi lingkungan.

8.1. Rumahtangga berdasarkan jenis atap

Indikator ini menyajikan proporsi rumah tangga yang menghuni rumah beratap bukan daun-daunan dan lainnya seperti seng, asbes, genteng, beton, dan sirap. Angka ini dapat digunakan sebagai petunjuk kondisi bangunan tempat tinggal penduduk. Secara umum, semakin besar angka ini semakin baik kondisi bangunan tempat tinggal secara keseluruhan. Penentuan atap seng, asbes, genteng ke dalam satu kelompok, didasarkan atas pertimbangan bahwa bahan tersebut hampir sama kuatnya.

Tabel 8.1. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Jenis Atap							Total
	Beton	Genteng	Sirap	Seng	Asbes	Ijuk	Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bukit Bestari	7,24	6,64	1,32	4,65	79,18	0,97	<0,01	100
Tanjungpinang Timur	8,11	0,49	0,43	3,31	86,98	<0,01	0,68	100
Tanjungpinang Kota	14,57	9,76	<0,01	15,35	53,58	6,75	<0,01	100
Tanjungpinang Barat	1,11	5,26	<0,01	28,02	65,61	<0,01	<0,01	100
Tanjungpinang	6,73	4,15	0,58	10,21	77,26	0,80	0,27	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Berdasarkan tabel 8.1. diatas dapat dilihat bahwa di Kota Tanjungpinang Jenis Atap Asbes menjadi primadona bagi rumahtangga yang ada, yaitu sebesar 77,26 persen dari total keseluruhan di Kota Tanjungpinang. Selain harga nya tidak terlalu mahal dan dapat ditemui diseluruh toko bangunan yang ada, secara kualitas atap jenis asbes ini

cukup dapat diandalkan. Sedangkan untuk jenis atap yang lainnya terdistribusi secara merata dengan persentase berkisar dari 4 hingga 6 persen.

8.2. Rumahtangga berdasarkan jenis dinding

Indikator ini menyajikan proporsi rumah tangga yang menghuni rumah berdinding bukan bambu dan lainnya seperti tembok dan kayu. Semakin tinggi persentase ini, cenderung semakin tinggi kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Jenis Dinding		Total
	Tembok	Kayu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukit Bestari	86,06	13,94	100
Tanjungpinang Timur	96,16	3,84	100
Tanjungpinang Kota	68,49	31,51	100
Tanjungpinang Barat	80,06	19,94	100
Tanjungpinang	87,35	12,65	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Jenis dinding Tembok sangat mendominasi di wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang sudah baik dengan persentase 87,35 persen rumahtangga di Kota Tanjungpinang sudah menggunakan tembok sebagai jenis dindingnya. Sisanya 12,65 persen rumahtangga di Kota Tanjungpinang masih menggunakan kayu/papan sebagai jenis dindingnya.

Jika dilihat berdasarkan Kecamatannya, Kecamatan Tanjungpinang Kota cukup banyak rumahtangga yang masih menggunakan kayu sebagai

dindingnya sebesar 31,51 persen. Jenis kayu/papan yang digunakan cukup beragam mulai dari kayu/papan kualitas rendah dan kayu/papan kualitas bagus.

8.3. Rumahtangga berdasarkan jenis lantai

Semakin besar proporsi rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah, mengindikasikan kondisi perumahan di daerah tersebut umumnya jelek. Semakin kecil angka persentase ini, cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Jenis Lantai					Total
	Keramik	Tegel	Semen	Kayu	Tanah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bukit Bestari	55,29	1,27	37,80	5,64	<0,01	100
Tanjungpinang Timur	46,31	<0,01	53,01	<0,01	0,68	100
Tanjungpinang Kota	30,77	<0,01	40,42	28,81	<0,01	100
Tanjungpinang Barat	45,17	1,11	53,72	<0,01	<0,01	100
Tanjungpinang	47,67	0,64	47,55	3,88	0,27	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Hasil Susenas 2011 memperlihatkan bahwa rumahtangga di Kota Tanjungpinang memilih keramik dan semen sebagai pilihan utama untuk jenis lantainya, masing-masing sebesar 47,67 persen dan 47,55 persen. Untuk jenis lantai yang lainnya tersebar merata diantara 1 persen hingga 3 persen.

Kecamatan Tanjungpinang Kota kembali menjadi perhatian untuk jenis lantai, dimana sebesar 28,81 persen rumahtangganya masih menggunakan papan/kayu sebagai jenis lantainya. Hal ini sejalan dengan

jenis dinding papan/kayu yang cukup diminati juga di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Jenis kayu/papan yang digunakanpun cukup beragam mulai dari kayu/papan kualitas rendah dan kayu/papan kualitas bagus.

8.4. Rumahtangga berdasarkan sumber listrik

Proporsi atau persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik (PLN + Bukan PLN). Indikator ini juga dapat memperlihatkan tingkat keterjangkauan pelayanan penerangan di daerah tersebut. Apalagi bila dipilih antar PLN dan non PLN.

Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Listrik dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Sumber Listrik				Total
	PLN	NON PLN	Pelita	Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	93,03	6,00	0,97	<0,01	100
Tanjungpinang Timur	95,66	2,34	0,68	1,32	100
Tanjungpinang Kota	100,00	<0,01	<0,01	<0,01	100
Tanjungpinang Barat	98,28	0,81	0,91	<0,01	100
Tanjungpinang	95,76	2,95	0,77	0,52	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Pelayanan PT.PLN yang semakin membaik dengan ditandai berkurangnya pemadaman bergilir semenjak awal tahun 2011 mengindikasikan adanya dominasi sumber listrik PLN yang digunakan rumahtangga yang ada di Kota Tanjungpinang. Dimana 95,76 persen rumahtangga sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber listriknya. Sumber listrik lainnya (Non PLN, pelita, dll) terdistribusi merata diantara 0 persen hingga 2 persen. Harapan kedepan kondisi listrik di Kota Tanjungpinang semakin membaik dengan berkurangnya pemadaman tanpa

alasan yang tidak jelas dan diikuti dengan jangkauan jaringan listrik yang sudah menyeluruh hingga ke pelosok daerah. Sehingga makin meningkatkan taraf hidup masyarakat, dikarenakan selain air, listrik termasuk komponen utama penunjang kehidupan masyarakat.

8.5. Rumahtangga berdasarkan sumber air minum

Air minum layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, dan mata air terlindung.

Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan air minum layak disuatu daerah merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menggunakan air minum layak dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih disuatu daerah menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut.

Tabel 8.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Sumber Air Minum								Total
	Air Kemasan	Air Isi Ulang	Ledeng Meteran	Ledeng Eceran	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bukit Bestari	16,47	37,02	19,01	1,58	<0,01	20,69	3,57	1,65	100
Tanjungpinang Timur	30,34	33,19	1,50	<0,01	0,70	30,43	3,84	<0,01	100
Tanjungpinang Kota	5,35	26,77	24,70	<0,01	1,91	35,38	4,73	1,16	100
Tanjungpinang Barat	20,23	36,28	7,27	0,97	3,18	31,01	1,06	<0,01	100
Tanjungpinang	21,92	34,59	9,93	0,71	1,13	27,92	3,19	0,60	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

Berdasarkan tabel 8.5., terlihat bahwa distribusi sumber air minum rumah tangga di Kota Tanjungpinang cukup merata antara air isi ulang, sumur terlindung dan air kemasan, masing-masing sebesar 34,59 persen, 27,92 persen dan 21,92 persen. Ketiga jenis sumber air minum ini termasuk dalam kategori air minum layak. Sedangkan untuk kategori air minum tidak layak (ledeng eceran, sumur tak terlindung, dan mata air) persentasenya kecil sekali berada diantara 0 persen hingga 3 persen.

Selain listrik, air minum atau air bersih merupakan unsur penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dengan tingginya persentase sumber air minum layak di Kota Tanjungpinang diluar kualitas tanah Kota Tanjungpinang yang mengandung batu granit, dapat dikatakan kehidupan masyarakat di Kota Tanjungpinang sangat baik.

8.6. Rumahtangga berdasarkan sanitasi

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan sanitasi layak disuatu daerah merupakan perbandingan antara rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak dengan jumlah rumah tangga keseluruhan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak di suatu daerah menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut.

Hasil Susenas 2011, di Kota Tanjungpinang 2,12 persen rumahtangga masih menggunakan sanitasi umum, 8,33 persen rumahtangga menggunakan sanitasi secara bersama atau lebih dari satu rumahtangga dan 89,55 persen rumahtangga memiliki sanitasi sendiri, atau dapat dikatakan tiap satu rumah tangga minimal memiliki satu sanitasi. Dari rumahtangga yang memiliki sendiri sanitasinya, 95,73 persen sanitasi

tersebut berupa leher angsa. Dengan kondisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi rumahtangga di Kota Tanjungpinang sangat baik berdasarkan sanitasinya.

Tabel 8.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Milik	Jenis Kloset	Tempat Pembuangan	Kecamatan				Tanjungpinang
			Bukit Bestari	TPI Timur	TPI Kota	TPI Barat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sendiri 89,55	Leher Angsa 95,73	Tangki	85,16	100	77,25	96,30	93,51
		Laut	0,92	<0,01	22,75	2,49	2,02
		Lubang Tanah	10,67	<0,01	<0,01	<0,01	3,22
		Lainnya	3,24	<0,01	<0,01	1,22	1,24
	Plengsengan 0,91	Laut	52,40	<0,01	<0,01	<0,01	35,06
		Lubang Tanah	47,60	100	<0,01	<0,01	69,94
	Cemplung 2,07	Laut	100	<0,01	100	<0,01	100
	Tidak Pakai 1,28	Laut	<0,01	<0,01	82,56	<0,01	62,17
Tanah/Kebun		100	<0,01	17,44	<0,01	37,83	
Bersama 8,33	Leher Angsa 96,38	Tangki	88,14	91,70	100	92,49	92,38
		Kolam	<0,01	<0,01	<0,01	7,51	3,16
		Lubang Tanah	11,86	8,30	<0,01	<0,01	4,46
	Cemplung 3,62	Laut	100	<0,01	<0,01	<0,01	100
Umum 2,12	Leher Angsa 65,65	Tangki	100	<0,01	<0,01	77,01	81,30
		Laut	<0,01	<0,01	<0,01	22,99	18,70
	Plengsengan 12,27	Kolam	<0,01	100	<0,01	<0,01	100
	Cemplung 11,70	Laut	100	<0,01	<0,01	<0,01	100
	Tidak Pakai 10,37	Laut	100	<0,01	<0,01	<0,01	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

8.7. Rumahtangga berdasarkan kepemilikan

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri di suatu daerah, semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 8.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2011

Kecamatan	Kepemilikan						Total
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas Sewa Milik Orang Lain	Bebas Sewa Milik Keluarga	Dinas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bukit Bestari	72,55	7,15	13,14	3,24	2,52	1,40	100
Tanjungpinang Timur	62,57	5,34	20,40	4,33	3,86	3,50	100
Tanjungpinang Kota	58,47	<0,01	20,89	3,79	16,85	<0,01	100
Tanjungpinang Barat	50,79	2,51	21,32	4,38	9,87	11,14	100
Tanjungpinang	62,68	4,86	18,40	3,97	5,77	4,32	100

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang, Susenas 2011.

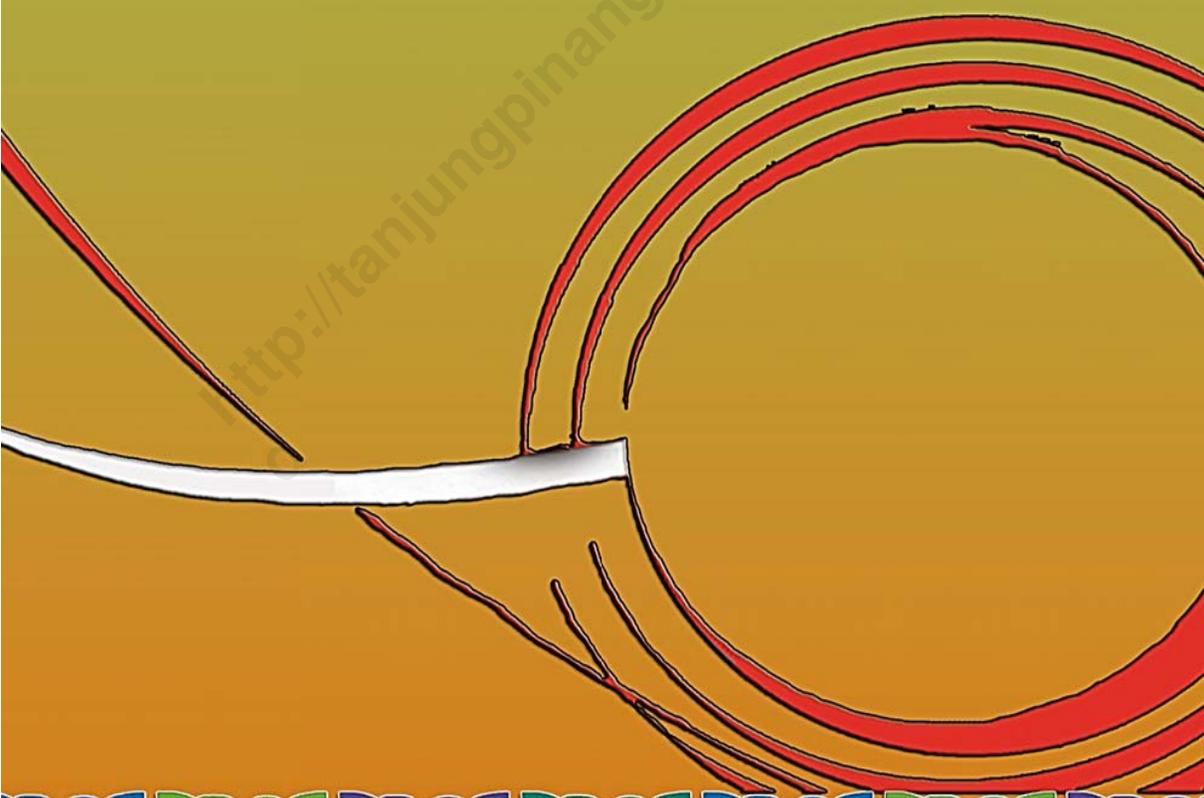
Semenjak ditetapkan nya Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Riau, migrasi masuk atau pendatang terus bertambah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi jumlah rumahtangga yang mengontrak dan menyewa rumah untuk tempat tinggalnya.

Hasil Susenas 2011, di Kota Tanjungpinang 62,68 persen rumah tangga memiliki rumah sendiri, diikuti dengan sewa sebesar 18,40 persen dan kontrak sebesar 4,86 persen. Sedangkan untuk status kepemilikan rumah lainnya didominasi dengan kepemilikan yang tidak berbayar (bebas sewa dan dinas) yang berada di tentan 3 persen hingga 5 persen.

<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



BAB IX
INDIKATOR KOMPOSIT



<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

BAB IX

INDIKATOR KOMPOSIT

Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan pembangunan manusia. IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta untuk menikmati standar kehidupan yang layak. IPM membantu menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang kemajuan pembangunan manusia, seperti daerah mana pembangunan manusianya lebih baik dan lebih cepat.

Walaupun IPM memberikan gambaran jelas tentang pembangunan manusia dan mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki. Selama ini pembangunan yang telah dicapai dianggap masih belum berpihak kepada perempuan dimana diduga masih terjadi ketidaksetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mengetahui kesetaraan tersebut adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG).

9.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia menurut jenis kelamin. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3)

dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah). Dimana nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100.

Tabel 9.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	(tahun)	2010	69,62
		2011	69,67
Angka Melek Huruf	(persen)	2010	97,31
		2011	98,70
Rata-rata Lama Sekolah	(tahun)	2010	9,42
		2011	9,68
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(ribu rupiah ppp)	2010	635,26
		2011	636,87
IPM		2010	74,59
		2011	75,25
Peringkat IPM		2010	91
		2011	

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang

Angka Harapan Hidup (AHP) Kota Tanjungpinang sebagai dimensi pertama dalam penghitungan IPM terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 AHP Kota Tanjungpinang berada pada angka 69,62 tahun dan meningkat di tahun 2011 menjadi 69,67 tahun. Angka ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Tanjungpinang dapat bertahan hidup hingga umur 69,67 tahun. Demikian juga dengan dimensi pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari ketiga dimensi yang meningkat tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa IPM Kota Tanjungpinang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010 IPM Kota Tanjungpinang berada pada angka 74,59 dan meningkat di tahun 2011 pada angka 75,25. Jika kita

melihat peringkat IPM secara nasional, tahun 2010 Kota Tanjungpinang berada pada peringkat 91 dari 497 Kabupaten/Kota.

9.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Dimana nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100. Adapun komponen pendukung dalam penghitungan IPG adalah Proporsi penduduk, Harapan hidup dalam tahun, Persentase Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Penduduk yang Aktif Secara Ekonomi (proporsi dari angkatan kerja), Upah non Pertanian, dimana seluruh komponen tersebut dipilah berdasarkan perspektif gender. Sedangkan komponen pendukung terakhir adalah pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah) di suatu daerah.

Berdasarkan tabel 9.2 IPG Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 berada pada angka 61,61. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 61,17. Namun Jika kita membandingkan dengan IPM Kota Tanjungpinang, terdapat selisih 12,98 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pembangunan manusia di Kota Tanjungpinang memiliki kesenjangan 12,98 persen antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Sedangkan jika dilihat dari peringkat IPG nasional, pada tahun 2010 IPG Kota Tanjungpinang berada pada peringkat 300. Peringkat ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 277 dari 497 Kabupaten/Kota.

Tabel 9.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	(tahun)	Laki-laki	67,70
		Perempuan	71,65
Angka Melek Huruf	(persen)	Laki-laki	99,14
		Perempuan	95,74
Rata-rata Lama Sekolah	(tahun)	Laki-laki	9,75
		Perempuan	9,19
Sumbangan Pendapatan	(persen)	Laki-laki	76,25
		Perempuan	23,75
IPG		2009	61,17
		2010	61,61
		2011	
Peringkat IPG		2009	277
		2010	300
		2011	

Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang

9.3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Dimana nilai indeks tersebut berkisar antara 0-100.

Berdasarkan tabel 9.3 IDG Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 berada pada angka 51,38. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 49,04. Hal ini dapat dikatakan bahwa hanya 51,38 persen penduduk perempuan yang diberdayakan dalam pembangunan di Kota Tanjungpinang. Sedangkan jika dilihat dari peringkat IDG nasional, pada

tahun 2010 IDG Kota Tanjungpinang berada pada peringkat 386. Peringkat ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 331 dari 497 Kabupaten/Kota.

Tabel 9.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2011

(1)	(2)	(3)
Keterlibatan perempuan di parlemen	(persen)	8,00
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	(persen)	49,15
Sumbangan perempuan dalam Pendapatan Kerja	(persen)	23,75
		2009
IDG		49,04
		2010
		51,38
		2011
		2009
Peringkat IPG		331
		2010
		386
		2011

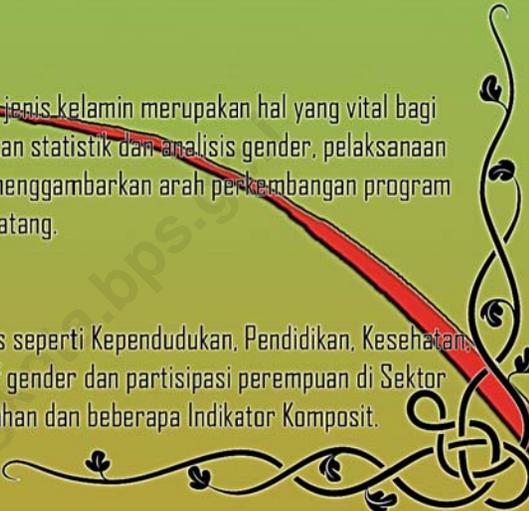
Sumber: BPS Kota Tanjung Pinang

<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>



Ketersediaan data dan statistik yang dirinci menurut jenis kelamin merupakan hal yang vital bagi badan pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan statistik dan analisis gender, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat tepat sasaran dan dapat menggambarkan arah perkembangan program di masa mendatang.

Penyusunan publikasi ini mencakup aspek-aspek strategis seperti Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, yang dipilah berdasarkan perspektif gender dan partisipasi perempuan di Sektor Publik, serta Kesehatan Lingkungan dan Perumahan dan beberapa Indikator Komposit.



Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang
Jl. raya Tanjungpinang - Tanjung Uban No. 01 Km. 10
website : tanjungpinangkota.bps.go.id
email : bps2172@bps.go.id

